

TROBUNAL

Bilingual Communication and Documentation of The Religious High Court of Bandar Lampung



Orkestrasi Manajemen Lembaga Peradilan

Orchestrating Religious Court Management

Laporan Utama / Main Report

Inovasi Terbaru Ditjend Badilag
*Brandnew Innovations of
The Directorate General of Religious Court Agency*

**Pelayanan Pengadilan
di Masa Pandemi Covid-19**
Court Services in Covid-19 Outbreak

Fokus PTA / Infocus
Pembinaan Hakim Baru
*The Coaching of New Judges
in Region of Lampung
(Ethical Inclusion, Work Culture,
and Justice Enforcement Dedication)*

TRIBUNAL PTA Bandar Lampung

Volume 1 Nomor 2 | Juni 2020

Volume 1 Number 2 | June 2020

Hal./ Page : 1

Sambutan Sesditjend Badilag

Acknowledgement by Secretary General of Religious Court Agency

Hal./ Page : 4

Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Acknowledgement by Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court

Hal./ Page : 8

Laporan Utama / Main Report:

Inovasi Terbaru Ditjend Badilag

Brandnew Innovations of

Directorate General of Religious Court Agency

Pelayanan Pengadilan di Masa Pandemi Covid-19

Court Services in Covid-19 Outbreak

Hal./ Page : 24

Fokus PTA / Infocus

Orkestrasi Manajemen Lembaga Peradilan Agama

Orchestrating Religious Court Management

Pembinaan Hakim Baru

The Coaching of New Judges in Lampung Region

(Ethical Inclusion, Work Culture, and Justice Enforcement Dedication)

Peluncuran Edisi Perdana Majalah Dua Bahasa Tribunal

Launching of Maiden Issue of the Tribunal Bilingual Magazine

Hal./ Page : 40

Dinamika Peradilan

Judiciary Update

Hal./ Page : 68

Cakrawala / Horizon:

Hukum Acara E-Litigasi

The Procedural Law of E-Litigation

Hal./ Page : 80

Ensiklopedi / Encyclopedia:

Pengadilan Elektronik / Electronic Court

Tribunal adalah Majalah Dwi Bahasa empat bulanan yang diterbitkan oleh PTA Bandar Lampung. Nama Tribunal diambil dari bahasa Inggris yang berarti "Pengadilan" atau Peradilan".

Majalah ini merupakan media komunikasi dan diseminasi informasi, inovasi peradilan, kebijakan-kebijakan terbaru dan proyeksi PTA Bandar Lampung ke depannya. Disajikan dalam dua bahasa, yaitu Indonesia-Inggris. Majalah ini diharapkan tidak hanya menjadi preferensi bagi lembaga atau institusi, praktisi dan akademisi hukum dan peradilan dalam negeri, namun juga dunia internasional. /IDN

Tribunal is a quarterly bilingual magazine published by Bandar Lampung Religious High Court. The name Tribunal was taken from English which means "court" or "judiciary". This magazine is a medium of communication and disseminating information, judicial innovations, the latest policies, and the Bandar Lampung Religious High Court future strategic plans. Presented in two languages, Indonesian-English, this magazine is expected to not only become preference for domestic legal institutions, practitioners and academicians on law and judiciary, but also internationally. /ENG

DEWAN REDAKSI

Editorial Board



Pelindung/Advisor:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung/
Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung/
Vice Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Penanggung Jawab/ Person in Charge:

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung/
Registrar of Bandar Lampung Religious High Court

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung/
Secretary of Bandar Lampung Religious High Court

Pimpinan Redaksi/ Chief Editor:

Ujang Solihin

Sekretaris Redaksi/ Editorial Secretary:

Yosrinaldo Syarief

Redaktur Pelaksana/ Managing Editor:

Tata Naskah/ Editor: Ade Firman Fathoni

Tata Letak/ Layouter: Dodi Alaska AS

Penerjemah/ Translator: M. Natsir Asnawi

Ilustrasi/ Illustrator: Restu Yuniarti

Distribusi/ Distribution: M. Agus Wibowo

Kontributor/Contributors:

Seluruh Pengadilan Agama Se-Lampung
Religious Courts around Province of Lampung

Alamat Redaksi/ Editorial Address:

Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 352211

Alamat Surat Elektronik/ E-Mail:

redaksi.tribunal@gmail.com

ISSN: 2771-5245

Sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama



Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M.

Acknowledgment

Secretary of Director General of The Religious Court Agency

Tribunal, Benchmark Manajemen Media Peradilan Tribunal, Court Media Management Benchmark

Ucapan syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga edisi kedua majalah dwi bahasa “Tribunal” Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat terbit sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul penutup yang membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

All gratitude to the presence of Allah SWT for guidance and bless so the second edition of the tribunal bilingual magazine can be published. Salawat and greetings may always be devoted to the Prophet Muhammad, the prophet and apostle who brought the message of Islam as a mercy to the universe.

Mewakili unsur pimpinan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, saya ingin menyampaikan apresiasi khusus kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Tim Redaksi yang dengan kerja kerasnya telah berhasil menyelesaikan edisi kedua majalan ini. Secara pribadi, saya menilai bahwa kehadiran majalah ini turut mewarnai dalam hal publikasi yang berkualitas dari lembaga peradilan. Selain memuat materi yang mencerahkan, majalah ini juga diasjikan dalam dua bahasa, yaitu Indonesia-Inggris. Atas hal ini, saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas upaya penerbitan tribunal yang sudah memberikan informasi yang tidak hanya menjangkau level nasional, tetapi juga internasional.

On behalf of Directorate General of the Religious Courts Agency, I would like to express special appreciation to the Bandar Lampung Religious High Court and the Editorial Team who, with their hard work, successfully completed the second edition of this magazine. Personally, I consider that the presence of this magazine has contributed to the quality of publications from the judiciary. In addition to present inspiring things, this magazine is also presented in two languages, Indonesian-English. Hereby, I give my ultimate appreciation for all of efforts in issuing this magazine which has provided information that reaches not only the national level, but also the international level.

Kehadiran majalah dwi bahasa ini menandai era baru dari publikasi Lembaga peradilan. Majalah Tribunal adalah benchmark (acuan) yang sangat representatif bagi pengadilan lain yang akan menerbitkan majalah atau publikasi institusi. Apa yang telah dicapai oleh Tim sangat patut mendapat apresiasi. Diharapkan pula, kehadiran majalah ini yang dikemas sedemikian rupa, mampu menyuntikkan motivasi bagi Pengadilan lain dalam berinovasi sehingga memberi dampak konstruktif bagi Peradilan Agama.

The presence of this bilingual magazine marks a new era of publication by the Judiciary. Tribunal Magazine is a benchmark that is very representative for other courts to publish same magazines or institutional publications. What has been achieved by the team deserves appreciation. It is also expected that the presence of this magazine which is packaged, somehow, is able to raise other Courts motivation in innovating so that create a constructive impact on the Religious Courts.

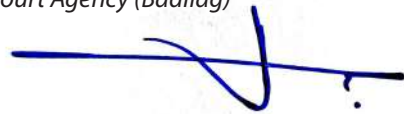
Akhirnya, saya berharap, media ini dapat digunakan oleh aparaturnya Pengadilan Agama khususnya di Provinsi Lampung untuk menyalurkan pemikirannya untuk kemajuan Pengadilan Agama dalam bentuk tulisan yang mencerahkan. Sukses selalu untuk Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Tim Majalah Tribunal.

Eventually, I expect this media can be used by the Religious Court apparatus especially in Lampung Province to channel their thoughts toward progress of the Religious Courts in the form of enlightening writings. I encourage for the more achievements of Bandar Lampung Religious High Court and the Tribunal Magazine Team.

Salam hangat...

Best regards,

Secretary of Director General of The Religious Court Agency (Badilag)



Drs. Arief Hidayat, S. H., M.M.



Bandar Lampung Religious High Court Top Leaders are set to actualize predicate of Integrity Zone, Free of Corruption Zone, and Clean and Serving Bureaucracy



Sambutan KPTA Bandar Lampung Untuk Edisi Kedua

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.



Segala puji bagi Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga edisi kedua majalah Tribunal Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ini dapat diterbitkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi dan rasul penutup yang membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.

All gratitude to the presence of Allah SWT for guidance and bless so the second edition of the tribunal bilingual magazine can be published. Salawat and greetings may always be devoted to the Prophet Muhammad, the prophet and apostle who brought the message of Islam as a mercy to the universe.

Edisi kedua ini mengetengahkan beberapa hal terkait dengan manajemen lembaga peradilan dalam era industri 4.0 serta dinamika peradilan selama masa pandemic Covid 19. Tema besar yang diusung dalam edisi kedua ini adalah orkestrasi dalam manajemen peradilan, yaitu suatu konsep

manajemen yang mengharmoniskan seluruh potensi yang ada agar dapat bekerja bersama dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

This second edition presents several issues about management of judicial institutions in the industrial era 4.0 and the dynamics of judiciary during the Covid 19 outbreak. The main theme presented in this second edition is orchestration in judicial management, a management concept that harmonizes every single resource and support each other to achieve predetermined goals.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akhir-akhir ini berupaya mengidentifikasi seluruh potensi yang dimiliki, baik sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta teknologi informasi yang dapat dikembangkan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Lembaga peradilan. Pandemi Covid 19 akhir-akhir ini telah memaksa kita untuk

berbenah dan mengubah cara-cara lama dalam manajemen Lembaga. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung merespon hal itu dengan mengubah cara-cara pembinaan dan pengawasan secara konvensional menjadi pembinaan dan pengawasan secara virtual.

The Bandar Lampung Religious High Court has lately sought to identify all of its resources, both human resources, supporting facilities and infrastructure, and information technology, that could be developed to support the implementation of the duties and functions of the judiciary. Covid's 19 Pandemic has recently forced us to tidy up and change our conventional ways of managing organization. Bandar Lampung Religious High Court responded to this by changing conventional methods of coaching and supervision into virtual coaching and supervision.

Karena itu, perubahan zaman maupun kejadian luar biasa seperti pandemic Covid 19 ini harus direspon secara cepat dan tepat oleh Lembaga peradilan. Kita tidak boleh terus mempertahankan cara lama dalam manajemen Lembaga. Sumberdaya yang ada harus dapat dikelola sedemikian rupa agar Lembaga peradilan tetap eksis dan mampu tampil sebagai garda terdepan penegakan hukum dan keadilan.

Therefore, the changing times and extraordinary events such as the Covid 19 pandemic should be responded quickly and accurately by our judiciary. We should terminate the use of conventional ways of managing organization. Existing resources should be managed in an exact way that the judiciary still exists and capable to perform its function as the front guard in law and justice enforcement.

Akhirnya, sebagai unsur pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, kami berharap, kehadiran edisi kedua ini semakin menambah wawasan para pembaca dan menumbuhkan kesadaran literasi, khususnya bagi seluruh warga Peradilan Agama di wilayah Lampung.

Finally, representing Bandar Lampung Religious High Court, we expect that the presence of this second edition will further broaden the readers' horizon and foster literacy awareness, especially for all stakeholders of the Religious Courts in Lampung region.

Chief Judge of Bandar Lampung
Religious High Court



Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.

Inovasi Badilag Berbasis Teknologi Informasi

Era Industri 4.0 menimbulkan gelombang disrupsi. Lembaga peradilan ikut terdampak dari disrupsi tersebut. Cara-cara lama dalam manajemen perkara dan administrasi umum di peradilan tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman sehingga perlu menyusun kebijakan-kebijakan strategis yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Merebaknya Covid-19 memaksa semua moda kegiatan dan tata kelola manajemen harus berubah untuk tetap dapat bertahan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sangat menyadari hal tersebut, karenanya beberapa kebijakan strategis dan inovasi disusun dan diimplementasikan oleh satuan kerja Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia.



**MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL B**

Badilag's IT-Based Innovations

Industry 4.0 creates massive disruption. Our Judiciary affected too. This disruption cause old fashion-case management and general administration are outdate. it should be responded by promoting strategic plans based on information technology platform which is highly efficient at cost. The Covid-19 outbreak forced us shifting our way of managing and administrating to be remain survived. Directorate General of Religious Court completely realize these circumstances, hence, several strategic plans and innovations has been promoted and implemented by all of Religious Court around Indonesia





Ujian Calon Pimpinan Secara Daring

Online-Based Fit And Proper Test



Modernisasi di Peradilan Agama selalu dikedepankan sejak kepemimpinan Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Sebagai contoh, Impelentasi Aplikasi SIPP sebagai platform administrasi perkara secara elektronik, 11 Inovasi Badilag, dan pembinaan secara virtual, sudah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu.

Modernization in the Religious Court has always been promoted since the leadership of Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. as the Director General of the Religious Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. It is represented by sum of strategic policies as follows: the implementation of the SIPP as the platform for electronic-based case administration, 11 Badilag Innovations, and virtual coaching, which has kicked off 1 year ago.

Berbagai terobosan inovasi tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak, mulai dari aparatur Pengadilan Agama hingga Masyarakat pencari keadilan.

"These innovations gave advantages to the apparatus of the Religious Courts and justice seekers."

Ide Uji Kepatutan dan Kelayakan/Fit n Propertest Online calon pimpinan Pengadilan Agama pun telah dicetuskan jauh sebelum pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia, dengan kata lain, ide awal inovasi ini dirancang bukan untuk menghadapi pandemi. Ketika kemudian Pandemi Covid-19 melanda, maka secara tidak langsung Uji Kepatutan dan Kelayakan/ Fit n Proper test Online menemukan momennya, yaitu kemampuan Ditjen Badilag dalam sistem mitigasi risiko yang jitu dan mampu beradaptasi dalam kondisi terburuk sekalipun.

The Idea for online-based Fit and Proper Test of court leader candidates has been proposed couple months before the Covid-19 pandemic broke out in Indonesia. Let's say, the idea of these innovations was not designed particularly to deal with a pandemic circumstance. Since the Pandemic Covid-19 struck, the online-based Fit and Proper Test found its moment. It marked the ability of Badilag to mitigate potential risks and confirm its adaption in the worst situation.

Sebagai langkah awal, mulai tanggal 4 Mei 2020 dan 5 Mei 2020, sebanyak 86 peserta ujian calon Wakil Ketua PA Kelas IB dan 116 peserta Ujian calon Wakil Ketua PA kelas II telah mengikuti Ujian Kelayakan dan Kelayakan / Fit & Proper Test, secara virtual.

On May 4 – 5 of 2020, the inaugural online-based fit and proper test was held. 86 participants took part the virtual test for candidates of Class IB Vice Chief Judge test and 116 participants for candidates of Class II.

Berikutnya, mulai tanggal 15 Juni 2020, sebanyak 18 peserta ujian Calon Wakil Ketua PTA, 46 peserta ujian Calon Wakil Ketua PA Kelas 1A, 49 peserta ujian Calon Wakil Ketua PA Kelas IB, dan 70 peserta ujian Calon Wakil Ketua PA Kelas II, telah mengikuti Ujian Kelayakan dan Kelayakan / Fit & Proper Test, secara virtual.

Then, on June 15 of 2020, 18 participants took part the virtual test for the Vice Chief Judge of the court of appeal, 46 participants took part for Class IA (first instance), 49 candidates took part for Class IB (first instance), and 70 participants took part for Class II (first instance).

Ujian dan tim penguji terbagi menjadi 2, yaitu Profile Assesment diuji oleh Assesor berasal dari konsultan PPSDM yang bekerja sama dengan Harrison Assessment, sedangkan untuk Fit and Proper Test diuji oleh Tim dari Mahkamah Agung.

Virtual test and examiner teams were divided into 2. First, it was Profile Assessment conducted by the Assessor of PPSDM (Center for Development of Human Resources) Consultant in collaboration with Harrison Assessment. Second, Fit and Proper Test conducted by a special team of the Supreme Court.



Efektif dan Efisien

Effective and Efficient

Berdasarkan penelusuran Tim Redaksi, belum ada instansi Pemerintahan di Indonesia, baik Instansi Vertikal maupun Instansi Horizontal yang pernah melaksanakan model kegiatan Fit n Proper Test Online seperti yang diadakan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI ini. Dengan kata lain, Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI adalah instansi Pemerintahan pertama di Indonesia yang mengadakan Fit n Proper Test online untuk seleksi formasi Pimpinan.

Our search found that there is no other government institution has performed virtual test for top leader position as Badilag conducted them last month. It addresses Badilag's breakthrough for conducting the very first online-based top leader fit and proper test in Indonesia.

Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI menuturkan bahwa keberhasilan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI melaksanakan Fit n Proper Test secara online ini mendapatkan berbagai apresiasi dari internal dan eksternal (8/10/20).

On an occasion, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., as The Director of Technical Official Development of Badilag, proclaim that Badilag's breakthrough received a positive appreciation from the external and internal parties.

Dari Internal, Ketua Mahkamah Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial telah menyampaikan apresiasi Khusus terhadap Tim Panitia Fit n Proper Test Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. Tim Seleksi Japati Mahkamah Agung telah melaksanakan Studi Banding ke Ditjen Badilag MARI dengan proyeksi mengadakan Fit n Proper Test Online untuk Japati. Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badimiltun Mahkamah Agung RI pun telah melaksanakan Studi Banding ke Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, dalam rangka melaksakan Fit n Proper Test online di Ditjen terkait untuk seleksi calon pimpinan Pengadilan di masa yang akan datang.

Chief Justice of The Supreme Court and Vice Chief Justice for Non-Judicial Affaris has conveyed their appreciation to the conducting team of online-based fit and proper test. The Supreme Court Selection Committee for High-Ranked Positions

carried out a comparative study to Badilag's Team due to their vision to conduct the same platform of high-ranked position test. It followed by a visit from the team of Directorate General of Military and State Administration Court.

Dari Eksternal, Tim PPSDM Consultant memberikan apresiasi tersendiri terhadap Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI terhadap keberhasilan dan kelancaran pengadaan Fit n Proper Test online, khususnya terhadap profesionalitas Panitia Fit n Proper Test Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI yang diketuai oleh Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, Dr. Sultan, S.Ag, M.H.

Outside judicial institution, consultant team of The Center for Development of Human Resources appreciated Badilag's achievement for successfully performed virtual test of court leaderships. Particularly, they pointed professionalism of the committee led by The Head Of The Sub-Directorate of The Judge's Transfer, Dr. Sultan, S.Ag., M.H.

Kegiatan ini adalah pelaksanaan anggaran belanja negara melalui DIPA Badilag Tahun 2020. yang mengalokasikan anggaran Fit and Proper Tes calon pimpinan pengadilan Agama Tahun 2020 sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Dengan dana sebesar itu, Ditjen Badilag dituntut untuk memberi solusi atas kekosongan sejumlah pimpinan dari 412 satuan kerja tingkat pertama dan 29 satuan kerja tingkat banding.



This program was conducted as part of the 2020 Badilag's budget implementation checklist. This year, Badilag allocates 1.2 billion rupiahs for fit and proper test program. By such amount of funds, Badilag should be able to point new chairperson for 412 court of the first instance and 29 court of appeal.

Kegiatan Fit n Proper Test Online hanya menghabiskan anggaran rata-rata Rp.2.369.059 untuk setiap peserta. Sebagai perbandingan, Tahun 2019, setiap peserta menghabiskan Rp.4.903.972 setiap orang, artinya, proses seleksi yang dilakukan secara virtual ini dapat menghemat sebesar 52,7 % anggaran, itupun belum termasuk anggaran transportasi yang dikeluarkan peserta pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Ini berarti, Badilag berhasil mengembangkan salah satu prinsip Smart and Prosperity yang memudahkan peserta.

This virtual test just spent an average budget of Rp. 2.369.059,- for each person. It means, virtual test cut off 52,7% than conventional test which spend an average of Rp.4.903.972 for each person. Virtual test also cut off another actual cost such transportation for every participant. Thus, Badilag has successfully promote smart and prosperity principle in human resource management.

Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluation and Follow-up

Ketua Panitia Fit & Proper Test, Dr. Sultan, S.H., M.H. yang juga merupakan Kasubdit Mutasi Hakim Ditjen Badilag dalam laporannya mengatakan bahwa, data dari Sistem Informasi Kepegawaian MA (SIKEP) menunjukkan bahwa saat ini terdapat sejumlah jabatan pimpinan Pengadilan dari Kelas IB dan kelas II yang lowong, pelaksanaan Fit and Proper Test ini, diharapkan dapat mengisi abatan-jabatan yang lowong tersebut.

Head of committee, Dr. Sultan, S.Ag., M.H., on an occasion of reporting the event, stated that the Supreme Court App (Staffing Information System/SIKEP) has shown several position of Class IB and Class II of the court of first instance remain vacant. Therefore, this fit and proper test program could completely fill these positions.

Selain untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan, Fit n Proper Test Online ini juga berfungsi maksimal untuk menilai kemampuan para peserta tentang teknologi informasi, termasuk mengevaluasi kesiapan teknologi informasi masing-masing satker peserta, mulai dari koneksi, sarana, fasilitas, dan lain sebagainya.

Besides, this virtual test is aimed to figure out all participants capability towards information technology. It is also promoted as the direct instrument to discover every court readiness in implementing information technology which include connection range, facilities, infrastructure, and so forth.

Fit n Proper Test Online juga akan menumbuhkan budaya dan pola pikir aparatur peradilan bahwa e-office sebagai salah satu program dalam reformasi birokrasi akan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan.

Furthermore, this virtual test is expected to raise constructive culture and mindset toward court officials that e-office is the fittest and the best platform to conduct bureaucracy reformation and create an ease and efficient bureaucracy.

Di sisi lain, masih ditemukan kekurangan dari pelaksanaan Fit n Proper Test online, diantaranya adalah kendala teknis seperti pemadaman listrik di berbagai daerah, penyesuaian waktu ujian dengan para peserta ujian diwilayah Indonesia Tengah dan Timur (point ini bisa jadi bisa disebut kendala, bisa juga disebut kelebihan).

Notwithstanding, we still figure out several apertures of this virtual test. In the middle of the test, we found some crack due to electricity shut down and the internet connection aborted. Besides, due to time zones, we should begin it earlier than daily workhour so participants in east part of Indonesia can still settle their time.

(021) 290 79 212

Call Center PTSP Online Badilag

Cegah Penyebaran

COVID-19

Kami Menyiapkan Beberapa Solusi Agar Anda Tidak Perlu Datang Secara Fisik Ke Ditjen Badilag, Tapi Tetap Bisa Mendapatkan Layanan Yang Prima.

Jam Pelayanan: Senin - Jumat jam 08.00 - 16.30 WIB



PTSP ONLINE, CALL CENTER, dan PUSAT DATA BADILAG (Online One Gate Integrated Services, Call Center, and Badilag's Data Center)

Untuk menjawab kebutuhan komunikasi antara Ditjen Badilag dan seluruh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di Indonesia yang selama ini masih banyak menemukan kendala yang disebabkan jauhnya jarak dan lamanya waktu dalam kordinasi setiap program kerja, keperluan kepegawaian, dan kebijakan Ditjen Badilag MARI, maka Ditjen Badilag meluncurkan Inovasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) online, Call Center, dan Bank Data Badilag.

Responding public need of communication, Badilag officially launch Online One Gate Services application (Online PTSP), Call Center, and Badilag's Data Center. These applications promoted to combat time and space barriers in coordination Badilag's work program, strategic plans, and staffing needs.

Dirjen Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan bahwa selama ini, seringkali pegawai-pegawai satuan kerja pengadilan di daerah harus datang langsung ke Badilag untuk berbagai macam urusan kedinasan, disamping membutuhkan waktu yang lama, hal itu juga memakan biaya yang cukup besar, PTSP online dan Call Center ini diluncurkan untuk mengurangi persoalan tersebut. "Hal ini (red: harus datang ke jakarta) kan menjadi tidak efektif dan efisien, dengan adanya PTSP Online dan Badilag Call Center ini, semua urusan dan pertanyaan dari seluruh satuan kerja pengadilan bisa

terjawab dengan cepat, hal ini juga sangat relevan di tengah merebaknya COVID 19 ini, sehingga kontak langsung antar manusia bisa dikurangi", demikian pungkasnya.

Director General, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. revealed consideration behind these innovations. He stated that most of the time, our court staffs in the region had to come directly to Badilag for various official affairs. Besides requiring a long time, it also cost a lot. For that reason, Badilag launch the online PTSP and Call Center to eliminate these ineffective and inefficient routine. The presence of PTSP Online and Badilag Call Center drive all matters and questions from all court work units being answered virtually and quickly. These meet our need of information handling in the Covid 19 outbreak. We, then significantly eliminate direct contact between humans.

Ide pertama PTSP Online/Call Center/Bank Data bermula rombongan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI berangkat ke Federal Court of Australia untuk Study Banding tentang Pelayanan Peradilan untuk Penyandang Disabilitas. Pada saat study banding tersebut, para pimpinan Ditjen Badilag menemukan bahwa para petugas disana sibuk melayani seluruh masyarakat satu negara bagian yang berkaitan dengan perkara, baik itu tentang putusan, eksekusi, bahkan hingga hal-hal kepaniteraan tertentu yang berhubungan dengan institusi lain, misal Imigrasi, Kepolisian, dan seterusnya.



"The entourage of Badilag who directly witnessing administration process in Federal Court, figure out some potential breakthrough to be implemented. They start to actualize ideas about live chatting-based PTSP, live call-based call center, and data center."

The very first idea of online PTSP/ Call Center/Data Center had risen in a special visitation of Badilag to Federal Court of Australia. This visitation was a comparative study on Judicial Service for Disabilities. While visiting Federal Court, top leader of Badilag found that officers intensively serve people all around the state including service of court verdict copy issuance, execution of court decision, and special matters in registrar related to other institution, such as immigration, police affairs, and so forth.

Para pimpinan Ditjen Badilag, demi melihat proses administrasi di Federal Court of Australia tersebut, langsung terlintas berbagai ide inovasi yang bisa dibuat dan diimplementasikan di Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI dan lingkungan peradilan di bawahnya, diantaranya adalah Inovasi Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) online (berbasis Live Chatting), Call Center (berbasis Live Call) dan Bank Data Badilag.

Layanan online yang disediakan PTSP dan Call Center Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama meliputi: a. Layanan Informasi Tenaga Teknis, merupakan layanan informasi terkait pengembangan dan pembinaan tenaga teknis peradilan agama, seperti informasi terkait promosi dan mutasi hakim dan panitera, kepangkatan, pencantuman gelar, pendidikan dan pelatihan, dan perizinan. b. Layanan Informasi Administrasi Peradilan, yaitu layanan seputar administrasi peradilan agama yang meliputi ketata laksanaan, penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Penerapan Zona Integritas, legalisasi akta cerai, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), E-Court, 11 Aplikasi unggulan Badilag, serta sistem informasi peradilan lainnya. Selain itu layanan ini juga meliputi data statistik perkara di peradilan agama dan termasuk permasalahan hisab dan rukyat serta perkara jinayat. c. Layanan Kesekretariatan, yaitu layanan seputar konsultasi anggaran, biaya mutasi, dan kegiatan non-teknis lainnya.



Kenapa Memilih PTSP Online Badilag?

Pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, terjuah dari penyebaran Covid 19



Efektif & Efisien

Anda tidak perlu datang secara langsung ke Ditjen Badilag sehingga lebih hemat waktu, biaya dan tenaga dan terjuah dari penyebaran virus corona

[Baca selanjutnya](#)



Akses Terbuka

Pelayanan kami dapat diakses oleh siapa saja tanpa kecuali bagi yang membutuhkan layanan Informasi sekitar peradilan agama dan hukum sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

[Baca selanjutnya](#)



Akuntabel

Pelayanan kami dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat, semua permohonan Informasi melalui satu pintu dan akan disalurkan melalui media chatting dan video call yang direkam dan didokumentasikan secara otomatis oleh sistem

[Baca selanjutnya](#)

Some online services provided by Badilag's online PTSP and Call Center are: a. Technical Officers Information Services (information service which provides important updates about development officer competencies and strategic plans on Judges and registrar transfer, promotion, inclusion of academical degree, education and training program, and licensing); b. Information service on court administration (services related to administration in religious court, implementation of quality assurance accreditation, integrity zone, divorce excerpt legalization, case tracking information system (SIPP), e-court, 11 Badilag priority apps, and other court information system); c. Administration services (services related to consulting budget, transfer fee, and other administration affairs).

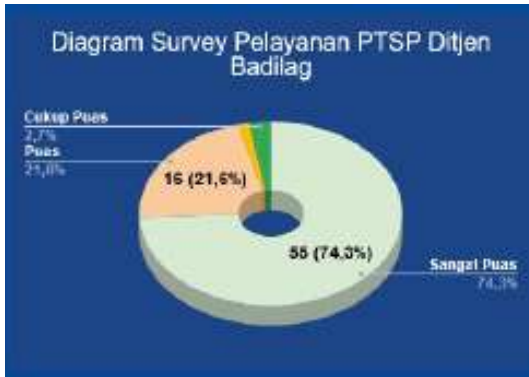
PTSP Online dan Call Center tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tapi juga menyediakan layanan konsultasi terkait penerapan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung yang sedang dijalankan, seperti mengenai penerapan Zona Integritas, Persoalan SIPP, dan penerapan E Court, instalasi dan penerapan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya.

The online PTSP and Call Center not only focusing to provide information needed, both also provide consultation service on implementing Supreme Court policies such as development of Integrity Zone, SIPP problems, implementation of e-court, and installation other relevant apps.

Saat ini, seluruh inovasi tersebut saat ini telah berjalan dengan baik, dan telah pula mulai diintegrasikan didalam PTSP Online layanan. Peta Tenaga Teknis dan Peta Yurisdiksi dan Perkara. Ke depan, akan diintegrasikan pula Pelaksanaan Mediasi pengadilan tingkat pertama ke Bank Data Badilag yang kemudian bisa dijadikan pertimbangan lanjutan untuk bahan promosi dan mutasi.

Nowadays, all of innovations completely operate and now begin to being integrated in online PTSP services. Badilag is now developing Technical Officers Map and Jurisdiction Maps as well. Furthermore, Badilag plans to integrate mediation updates into Badilag's Data Center and projected as basis to promoting Judges and court officers.

Beragam apresiasi yang telah diterima oleh Ditjen Badilag MARI, diantaranya dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, S.H. M.H., Ketua Kamar Agama MARI, YM Dr. Amran Suadi, S.H., M.H. dan juga hakim-hakim agung dari Kamar Agama juga memberikan apresiasi dan



testimoni, Ketua Komisi Yudisial, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum., Duta Besar negara sahabat seperti Oudi Ben Abdellah (Duta Besar Maroko), Dr. Mohammad Adnan Ghosan Syeikhu (Duta Besar Bahrain) dan Mohammad, Kh. H. Azad (Duta Besar Iran), M. Rifqynizami Karsayuda (fraksi PDI P), Bachruddin Nasori, S.Si., M.M. (fraksi PKB), Dr. Setiawan Budi Utomo (Otoritas Jasa Keuangan), juga dari para Akademisi.

Badilag receives many positive appreciations. They come from many stakeholders, such Vice Chief Justice of The Supreme Court, Dr. Sunarto, S.H., M.H.; Chief of Religious Chamber, Dr. Amran Suadi, S.H., M.H.; Associate Justices of Religious Chamber, Chief of Judicial Commission, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.; Ambassadors of associated countries(Oudi Ben Abdellah (Morocco), Dr. Mohammad Adnan Ghosan Syeikhu (Bahrain) and Mohammad, Kh. H. Azad (Duta Besar Iran)); M. Rifqynizami Karsayuda (House of Representation), Bachruddin Nasori, S.Si., M.M. (House of Representation), Dr. Setiawan Budi Utomo (Financial Services Authority), and from universities.

Apa Kata Mereka ?



Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim Agung/Ketua Kamar Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTSP online yang digagas oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) hadir pada saat yang tepat, tidak saja sebagai terobosan signifikan pada era revolusi industri 4.0. Tapi lebih dari itu, telah mendukung usaha-usaha pemerintah menghadapi pandemi covid 19 sekaligus melindungi segenap aparaturnya pengadilan agama dan masyarakat pencari keadilan secara simultan dengan menerapkan psychal distancing secara konkrit, dengan demikian telah sejalan dengan asas solus populii supreme lex esto (asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi).

Karena itu, saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas layanan ini, tetap semangat untuk kita semua.



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Dengan hadirnya sistem **Call Center, PTSP Online dan Pusat Data** yang dirinti oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI, pertama saya mengucapkan selamat, semoga pelayanan di Pengadilan khususnya pada Pengadilan Agama dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.



Dr. Mohammed Adnan Ghosan Syeikhu

Duta Besar Kerajaan Bahrain untuk Indonesia di Jakarta

Suatu terobosan yang luar biasa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI dalam memberikan pelayanan bagi pencari keadilan serta inovasi ptsp online, semua inovasi tersebut sangat membantu bagi masyarakat dan memperlancar kerjasama di dunia peradilan khususnya dengan lembaga peradilan kerajaan Bahrain.

APLIKASI VISION

(Virtualisasi Surat Izin Online Ditjen Badilag)



Badilag's Vision App (Online License)

Dalam rangka mewujudkan Peradilan Agama modern berbasis teknologi informasi dan pelayanan publik yang prima serta mendukung pencegahan penyebaran Covid-19, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI sebagaimana melalui surat Dirjen Badilag MA RI Nomor 1027/DJA/HM.0J/3/2020 tanggal 17 Maret 2020 sebagai tindak lanjut dari SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang mana telah dirubah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2020, Dirjen Badilag meluncurkan aplikasi internal yakni aplikasi VISION (Virtualisasi Surat Izin Online) yang dimanfaatkan oleh seluruh Peradilan Agama serta aplikasi gugatan mandiri yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh para pencari keadilan.

Exercising our vision to establish modern and technological-based Religious Court, excellent services, and supporting Covid 19 protocol, Directorate General of Religious

Court Body issued Director General Decree Number 1027/DJA/HM.0J/3/2020 dated March 17 2020 as the following of Supreme Court Circular Letter Number 1/2020 which revised by Supreme Court Circular Letter Number 3/2020. This regulation is the basis for launching VISION (Online License) (as the platform for Religious Court apparatus to file license application virtually) and self-service for lawsuit app for justice seekers.

Pelayanan Perizinan menggunakan aplikasi Vision (Virtualisasi Surat Izin Online) dapat diakses melalui alamat : <http://ditbinganis.badilag.net>, melayani penerbitan izin diantaranya:

1. Izin Keluar Negeri Tenaga Teknis Peradilan Agama.
2. Izin Tidak Masuk Kantor bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. Izin Cuti bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.
4. Izin Pencantuman Gelar Tenaga Teknis Peradilan Agama.
5. Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal.
6. Izin Belajar Tenaga Teknis Peradilan Agama.
7. Izin Penelitian Tenaga Teknis Peradilan Agama;

License services through Vision can be accessed on <http://ditbinganis.badilag.net>. Several services are available in this app, as follows:

1. *License of abroad visit for Judges and technical officers;*
2. *License for absenting workhour for Chief Judge of Religious High Court;*
3. *License of work vacation for Chief Judge of Religious High Court;*
4. *License for inclusion academical degree;*
5. *License for single judge trial;*
6. *License for further study;*
7. *License for research.*

Ide awal diciptakan Aplikasi Vision adalah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efektif, dan lebih pasti tentang nasib permohonan tersebut. Dengan kata lain aplikasi Vision ini diciptakan berbasis kecepatan layanan, untuk memudahkan sampainya tata persuratan dari Hakim di tingkat bawah sampai di Eselon I/II.

"Reason behind Vision App was institutional will to present a speedy, effective, and certain status of filed license form. Besides, it was created to increase speed of services in order to ease of delivering mail administration from Judges and echelon I - II"





WISUDA PURNABAKTI KPTA SECARA VIRTUAL

Virtual Retirement Ceremony of Chief Judge of The Religious High Court

Rabu, 29 April 2020, genap sudah pengabdian Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai hakim peradilan agama. Di tengah situasi merebaknya penyebaran Covid 19 di berbagai daerah, wisuda purnabhakti tetap diselenggarakan dengan memenuhi standar protokol pencegahan Covid 19. Selain dihadiri seluruh unsur pimpinan, hakim tinggi, ketua pengadilan agama se Jawa timur dan pegawai PTA Surabaya. Acara ini juga dihadiri Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, YM. Dr. Amran Suadi, S.H., M.H. dan Dirjen Badan Peradilan Agama MARI, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. dan seluruh Ketua PTA se Indonesia melalui telekonferensi.

On April 29 of 2020, Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. has accomplished his duty as Chief Judge of Surabaya Religious High Court. Regarding Covid 19 pandemic, the retirement ceremony held virtually as an implementation of Covid 19 protocols. Several participants attended this ceremony, they were top leaders, Associate Judges, Chief Judges of the first instance around East Java, and court officials of Surabaya Religious High Court. It was virtually led by Chief

of Religious Chamber of The Supreme Court, Honorable Dr. Amran Suadi, S.H., M.H., and Director General of Badilag, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. Chief Judges of the first instance outside east java also participated virtually.

Meskipun dilaksanakan secara virtual, upacara wisuda purna bhakti ini berjalan dengan lancar dan khidmat. Dimulai pimpinan PTA Surabaya dan para hakim tinggi menempati tempat yang telah ditentukan, seluruh Ketua PTA se Indonesia bergabung melalui telekonferensi. Setelah pejabat yang diwisuda memasuki ruangan upacara, kemudian Dirjen Badilag MARI dan Ketua Kamar Agama MARI bergabung secara virtual melalui telekonferensi.

Despite the retirement ceremony conducted virtually, it was kept solemn. It began with top leaders and associate Judges of Surabaya Religious High Court have their own seat, then followed by Chief Judges of Religious High Court all around Indonesia coming to the virtual ceremony. Soon after that, the retired Chief Judge entering the site and then Director General of Badilag and Chief of Religious Chamber virtually join the ceremony.

Para peserta kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung. Setelah pembacaan doa, Surat Keputusan Presiden R.I. dan sekilas riwayat jabatan Bahrusam Yunus dibacakan. Penanggalan kalung jabatan sekaligus diganti dengan kalung bunga melati oleh Yang Mulia Ketua Kamar Agama MARI didelegasikan kepada Ketua PTA Surabaya yang baru, Drs. Yamin Awie, S.H., M.H.



In the very first of ceremony series, all of participants sang along Indonesia official theme song "Indonesia Raya" and Supreme Court hymn. It as protocol for every single official ceremony. It then followed by reciting pray and announcement for the official decree of retirement issued by The President of the Republic of Indonesia. Master of Ceremony then read the brief profile of Bahrusam Yunus. As an official sign of retirement, official necklace then detached and replaced with jasmine necklace by The Honorable Chief of Religious Chamber which has delegated his authority doing that to the current Chief Judge of Surabaya Religious High Court, Drs. Yamin Awie, S.H., M.H.

In his speech, The Honorable Chief of Religious Chamber appreciated and expressing gratitude to the retired Chief Judge. He said, "It's been a God's will that in our lives, there is time for us kept together and there is a time of separation, the ups and downs of life you have been through, thank you for the cooperation so far, I, on behalf of the Supreme Court leader, express my pride and respect for a long career that can arrive safely at the end of devotion."

Dalam sambutan pelepasan, YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya, "Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan kita ini, ada waktu bersama dan ada waktu berpisah, pasang surut kehidupan telah bapak lalui, terima kasih atas kerjasama selama ini, saya atas nama pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan rasa bangga dan menghargai perjalanan karir yang begitu panjang dapat tiba dengan selamat pada ujung pengabdian." Demikian ungkapnya, yang disampaikan dari gedung Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Keberhasilan Wisuda Purnabhakti Virtual PTA Surabaya ini, menjadi yurisprudensi pelaksanaan Wisuda Purnabhakti Virtual, dan Ketua Mahkamah Agung telah menginstrusikan untuk mengadakan Wisuda Purnabhakti Ketua PTA Yogyakarta secara Virtual, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020.

The completion of this virtual retirement ceremony gave a firm basis to establish the same ceremony when a Chief Judge soon entering retirement period. The nearest retirement to come is Chief Judge of Yogyakarta Religious High Court. Chief Justice of The Supreme Court instructed to conduct the next virtual retirement ceremony on June 30 2020.





Pelayanan Peradilan Agama di Wilayah Lampung di Masa Pandemi COVID-19

Religious Court Services All Around Lampung in Covid-19 Outbreak

Kebijakan Mahkamah Agung RI.

Policies of Supreme Court

Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI mengadakan diskusi terbatas melalui aplikasi Zoom dengan Family Court of Australia tentang bagaimana pengadilan menghadapi krisis penularan virus corona yang terjadi di berbagai belahan dunia ini dan telah banyak memakan korban jiwa dan mengubah cara orang berinteraksi secara drastis.

The Directorate General of Badilag conducted a limited discussion through Zoom application with the Family Court of Australia about how the courts deal with the crisis of corona virus transmission that occurred in various parts of the world and which has claimed many lives and changed the way people interact drastically

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI berbicara tentang kondisi penyebaran Covid 19 ini di Indonesia dan bagaimana kebijakan Mahkamah Agung

dalam menyikapinya. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya perkara yang sedang ditangani, khususnya di pengadilan agama, sehingga perlu penanganan dan pendekatan yang bertahap agar tidak terjadi kekacauan dan penumpukan perkara yang mengakibatkan tersumbatnya hak-hak hukum masyarakat, selain itu setiap daerah di Indonesia mempunyai karakteristik wilayah dan kepadatan masyarakat yang berbeda sehingga status penyebaran Covid19 mempunyai tingkatan yang beragam, sehingga dibutuhkan pendekatan yang harus disesuaikan dengan masing-masing daerah. "Mahkamah Agung berkomitmen penuh menegakkan standar penanganan dan pencegahan penyebaran Covid19 yang sudah ditetapkan pemerintah" ungkap Dirjen Badilag.

On this occasion, the Director General spoke about the condition of the Covid 19 outbreak in Indonesia and how the Supreme Court responding it by issuing some strategic

policies. The obstacle faced is the number of cases being handled, especially in the religious court, so that it is necessary to handle and firming a gradual approach to avoid chaos and case backlogs. Besides, each of region in Indonesia has regional characteristics and community density different so that the status of the Covid19 berak out has varying degrees, so an approach that needs to be adapted to each region is needed. "The Supreme Court is fully committed to upholding the standards for handling and preventing the spread of Covid19 set by the government," said Director General.

Dirjen Badilag kemudian menjelaskan kebijakan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang mengintruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (work from home).

The Director General of Badilag then explained the policy of the Supreme Court of Indonesia through Circular No. 1 of 2020 concerning Guidelines for Performing Duties During the Prevention Period for Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) within the Indonesian Supreme Court which instructed the court to make adjustments on their work system based on the Circular of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform, where judges and judicial apparatuses can carry out official duties by working in their home/residence (work from home).



Protokol Kesehatan tetap dijalankan meskipun dengan fasilitas yang sederhana

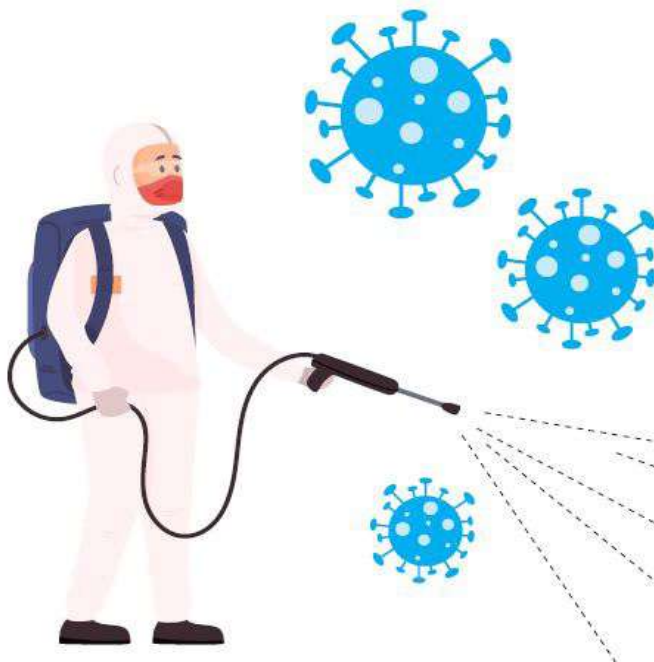
Health Protocol keep implemented despite using modest apparatus





Majelis Hakim selama bersidang menggunakan APD lengkap demi menjaga diri dari penyebaran virus Corona

Judge assembly conduct trial by using complete body Shield to avoid getting affected by Corona virus



Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan, majelis dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing). Untuk hal itu, Pengadilan menetapkan protocol persidangan yang di antaranya pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

If there are cases that need to be heard, the trial postponement and restriction on visiting court are subject to Judges authority. Court should determine whether court can restrict number of filed cases a day and safe spaces among visitors (social distancing). For that reason, every visitor need to be checked their body temperature and avoid physical contact like as shaking hands among visitors.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

VISI
TERHADAPAN PERADILAN AGAMA
YANG ALAMAH DAN BERKUALITAS
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

MISI

1. MENYALINGKAN KUALITAS DAN TRANSPARANSI
2. MENINGKATKAN PROFESIONALITAS
3. MELAKUKAKAN PENYALINGAN YANG SEPERTI DAN LEBIH
4. MENYALINGKAN TERHADAPAN AGAMA DAN PERADILAN TINGGI BERKUALITAS

11
11 Tahun Berdiri
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG



in Focus

Fokus Utama



Orkestrasi Manajemen Pengadilan Agama

Orchestrating Religious Court Management

Oleh / By: Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Wakil Ketua PTA Bandar Lampung

Vice Chief Judge of Religious High Court of Bandar Lampung

Sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif (kehakiman), pengadilan memegang peranan sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Keberadaan lembaga pengadilan merupakan keniscayaan dalam tatanan negara hukum (the rule of law). Ini dikarenakan lembaga Pengadilan-lah yang diharapkan menjadi benteng terakhir penegakan hukum jika seluruh instrumen penyelesaian perkara di luar Pengadilan tidak ternyata berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada.

Representing the judicial power, the court plays a significant part in law and justice enforcement. The existence of a judicial institution is a necessity in the rule of law. We all expect that our courts completely became the last resort of law enforcement if all instruments for resolving cases outside the court failed to resolve disputes.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Pengadilan memiliki perangkat yaitu Hakim sebagai pejabat dan pelaksana utama (core unit) kekuasaan kehakiman (yang Sebagian di antaranya menjadi pimpinan) dibantu oleh unit pendukung di kesekretariatan dan kepaniteraan (supporting unit). Seluruh perangkat pengadilan tersebut, baik core unit maupun supporting unit harus mampu bekerja sama dalam memastikan keseluruhan elemen dan fungsi pengadilan berjalan dengan baik.

Judges as the core unit of the judicial authority (some of whom are leaders) were assisted by the supporting units (registrar and secretariat) to carry out the main function of the court. Both of core units and supporting units should be able to work as a team in ensuring all elements and functions of the court operates perfectly.



Hakim, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab utamanya mengadili perkara wajib memerhatikan segala instrumen norma hukum yang ada serta memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung guna memaksimalkan kinerja penyelesaian perkara. Demikian, pula kepaniteraan sebagai unit yang secara langsung membantu fungsi Hakim wajib pula memanfaatkan segala sarana yang ada agar pelaksanaan tugas di kepaniteraan benar-benar mampu menopang pekerjaan utama Hakim dalam menyelesaikan perkara. Adapun kesekretariatan bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja lembaga, khususnya terkait dengan penanganan perkara yang merupakan core business dari lembaga peradilan.

Exercising main duties and responsibilities in adjudicating cases, Judges are obliged to take notice to all existing legal norms and utilize supporting facilities to increase case clearance rate. Likewise, the Registrar as a unit that directly assists the function of the Judge must also utilize all available facilities so that the implementation of the duties in the Registrar's Office is really able to prop case handling. The secretariat is

responsible for ensuring the availability of facilities and infrastructure to support the performance of the institution, particularly in relation to handling cases which are the core business of the judiciary.

Perubahan zaman menyebabkan berubahnya cara kita menangani suatu masalah, cara kita mengatur berbagai hal, cara kita berinteraksi, bahkan cara Pengadilan mengendalikan proses yang terjadi secara internal dan bagaimana mengelola isu serta respon (ekspektasi) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Industri 4.0 menanda suatu era dimana kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan pencapaian hasil maksimal adalah paradigma yang melandasi setiap proses sosial yang terjadi. Dari mulai perniagaan, industri, pemerintahan, dinamika sosial, bahkan dunia peradilan terdampak dari berubahnya cara kita memaknai, memahami, dan memperlakukan kehidupan sosial. Cara-cara lama dalam berbisnis atau mengelola suatu pekerjaan tergilas oleh cara baru yang lebih efisien dan efektif. Karenanya, gagap terhadap perubahan tersebut akan menenggelamkan ke jurang kegagalan.

Many aspect in our lives has changed due to changing times. The way we deal a problem, the way we manage things, the way we interact eachother, even the way the Court controls the processes that occur internally and how to manage public issues and responses (expectations) to the judiciary, has changed. Industry 4.0 marks an era where speed,

Fokus Utama

accuracy, efficiency, and achieving maximum results are the paradigms that underlie every social process we faced. Of commerce, industry, government, social dynamics, even the world of judiciary were affected by the change in the way we interpret, understand and treat social life. The old school of doing business or managing a job are crushed by contemporary ways which are more efficient and effective. Therefore, stuttering of these changes will drown into the abyss of failure.

Era industri 4.0 bahkan turut pula memaksa dunia peradilan berbenah sedemikian rupa. Cepatnya arus informasi, masifnya jumlah informasi yang harus dipahami, meningkatnya desakan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan aksesibel, serta keinginan memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, mau tidak mau, lembaga peradilan harus berbenah merespon itu semua. Ada tantangan besar bagi dunia peradilan merespon era ini yang sarat dengan disrupsi.

Evenmore, the industrial era 4.0 forced our judiciary to improve, somehow. Speedy information flow, the massive amount of information that must be understood, the increasing pressure to create an effective, efficient and accessible judiciary, as well as the expectation to cut complex bureaucratic flow, inevitably, the judiciary should respond these by increasing their management. There is a big challenge for our judiciary to respond this era of disruption.

Industri 4.0:

Peradilan dalam Kerangka Hyperconnected Society

Industry 4.0:

Judiciary in a Hyperconnected Society

Lalu, bagaimana seharusnya Pengadilan merespon itu semua? Sebelum menjawabnya, perlu dipaparkan sedikit tentang fenomena industri 4.0 ini. Rhenald Kasali menjelaskan secara ringkas beberapa aspek penting dari era Industri 4.0. Pertama, era ini ditandai dengan hyperconnected, yaitu terhubungnya mesin dan segala benda dari seluruh belahan dunia. Kedua, kekuatan untuk terhubung kini dalam genggam tangan berkat adanya enam pilar dalam teknologi, yaitu internet of things (internet), cloud computing (komputasi awan), big data analytic (analisis

data yang masif), artificial intelligence (kecerdasan buatan), super apps (aplikasi super), broadband infrastructure (infrastruktur pita lebar). Ketiga, disrupsi, yaitu berubahnya cara-cara kita dalam menyelesaikan masalah, cara kita dalam bekerja, atau cara manusia dalam menghasilkan sesuatu. Cara lama digantikan dengan cara baru, demikian pula dengan alat-alatnya. Keempat, pola industri dimana konsumen tidak lagi sekadar menikmati (consuming), namun juga menyebarkan (sharing) dan merekayasa (shaping) .

We then reach a crucial point, how courts responding to that circumstances?. We, firstly, need to explain the highlight of the industry 4.0 phenomenon. Rhenald Kasali explained some crucial aspects of the Industrial 4.0 era. First, this era was marked by hyperconnected, it refers to the connection of machines and all objects from around the world. Second, we absolutely hand the power to connect, thanks to the six pillars of technology, the internet of things, cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, super applications, broadband infrastructure. Third, disruption which means changing the ways we solve problems, the way we work, or the way humans produce things. The old school is replaced by the new way, as well as the tools. Fourth, the industrial pattern creates new habits for consumers. They are no longer enjoy, but also participate (share) and engineer (form).

Karenanya, menurut Rhenald Kasali penting bagi setiap organisasi mereformulasi strategi bisnis, kehumasan, marketing, kepemimpinan, serta mengidentifikasi ulang langkah-langkah yang perlu dilakukan agar proses dalam organisasi tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan situasi dan tantangan saat ini . Tidak ada satupun organisasi yang dapat menafikan pentingnya melakukan perubahan dalam menanggapi situasi saat ini yang semakin kompleks dan mengandalkan kecepatan serta ketepatan. Salah dalam mengelola organisasi dan segenap elemennya akan berakibat fatal bagi kelancaraan proses

di dalam suatu organisasi.

Thereupon, Rhenald Kasali address the importance for any organization to reformulate business strategy, public relations, marketing, leadership, and to re-identify the urgent steps to insist the processes in the organization remain relevant and capable to adapt current situations and challenges. Each organization couldn't deny the importance of making changes in responding to the current situation which is complex and relies on speed and accuracy. When an organization fail to manage system and all of its elements, it would ruin the entire process.

Eksemplar dalam lembaga peradilan cukup banyak untuk kita ketengahkan dalam membahas mengenai pentingnya perubahan agar lembaga peradilan tetap efektif dalam menjalankan fungsinya. Satu contoh paling dekat adalah Singapura. Sebelum tahun 1992, Peradilan Singapura penuh dengan ketidakpastian, penumpukan beban perkara. Bahkan, dalam satu periode, Pengadilan Singapura pernah mengalami penumpukan perkara yang mencapai 2000 perkara dan belum ada yang disidangkan. Parahnya, banyak di antaranya yang belum disidangkan padahal sudah terdaftar sejak 10 tahun sebelumnya.

There are enormous model in the judiciary for us to discuss in the importance of judicial reform to keep the judiciary remains effective. One of the closest examples is Singapore. Before 1992, the Singapore Judiciary was filled with uncertainty, huge case backlogs. In fact, in one period, the Singapore Court had experienced an accumulation of cases that reached 2000 cases and none of the been tried. It's even worse by the end because many of them have not been tried even though they have been registered since 10 years before.

Menghadapi situasi ini, pada tahun 1992, Ketua Mahkamah Agung Singapura saat itu, Yang Mulia Yong Pung How menginstruksikan para Hakim untuk lebih

proaktif dalam penanganan perkara di Pengadilan. Sistem yang dibangun saat itu adalah active case management, yaitu manajemen penanganan perkara yang menekankan peran aktif Hakim, Advokat, para pihak, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan produktivitas aparat dan lembaga peradilan itu sendiri. Dalam salah satu bagian dari active case management tersebut, dikenal istilah technology court atau pengadilan berbasis teknologi (informasi).

Dealing with this horrible facts, in 1992, Chief Justice of the Singapore Supreme Court, The Honorable Yong Pung How instructed all Judges to be more proactive in handling cases. He built a new system of case handling, active case management. It was the management of case handling that emphasized the active role of Judges, Advocates, parties, and the use of information technology to support productivity of apparatuses and the judiciary itself. In particular part of the active case management, the term "technology court" which means information-based court has been risen.

Setelah diterapkannya kebijakan tersebut, Singapura perlahan membenahi lembaga peradilannya. Tidak perlu waktu lama. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, perombakan besar-besaran dan pemanfaatan secara massif teknologi informasi berhasil mengubah wajah peradilan Singapura dari sebelumnya muram menjadi lembaga peradilan yang, bahkan, menjadi salah satu yang paling bersih dan terbaik di dunia. Survey beberapa lembaga internasional menegaskan posisi Singapura sebagai model bagi lembaga peradilan yang bersih, akuntabel, dan modern.



Soon after executing those policies, Singapore completely revised its judicial institutions. It doesn't took much times. In just 10 years, a massive overhaul and use of information technology succeeded in changing the face of Singapore's judiciary from being grim to a judicial institution which, in fact, became one of the cleanest and best in the world. A survey of several international institutions confirms Singapore's position as a model for clean, accountable and modern justice institutions.

Situasi peradilan di Indonesia memang tidak separah Singapura pada decade 1990-an tersebut di atas. Namun demikian, peradilan Indonesia tetap memerlukan pembaruan massif di segala sector, khususnya manajemen lembaga pengadilan, baik mengenai keperkaraan maupun non keperkaraan. Beberapa kebijakan terbaru merespon industri 4.0 telah digulirkan Mahkamah Agung, baik di bidang teknis yudisial maupun administrasi umum. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peradilan elektronik (e-court), SIMARI, dan lainnya adalah aplikasi yang mewakili paradigma terkini Mahkamah Agung dalam merespon perkembangan teknologi dan berubahnya cara-cara dalam tata kelola kelembagaan.

In Indonesia, the judiciary situation was not as severe as Singapore in the 1990s. However, the Indonesian judiciary still requires massive reformation in the entire sectors, particularly the management of the court, both in terms of litigation and general administration. Some of the latest policies responding to industry 4.0 have been rolled out by the Supreme Court, both in the technical judicial and general administration. Case Tracking Information System (SIPP), electronic court (e-court), Supreme Court of Information System (SIMARI), and so forth are applications that represent the Supreme Court's latest paradigm in responding to technological developments and changing ways in governance management.

Masifnya arus informasi dan kebutuhan pengorganisasian data/dokumen pendukung peradilan mewajibkan kita untuk mengubah cara-caramadalam penyimpanan, pendokumentasian, pengorganisasian, dan pemanfaatan data. Karakteristik hyperconnected society juga tergambar dalam dunia peradilan kita. Di antara satuan kerja hingga Mahkamah Agung, masing-masing memerlukan data dukung untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, peningkatan kapasitas

Hakim dan aparaturnya, dan sebagainya. Untuk kepentingan itu, kita semua di dalam lingkungan peradilan, memerlukan keterhubungan data/dokumen satu sama lain, dimana jumlah data/dokumen juga sangat banyak sehingga perlu penanganan berbeda dan instrumen yang benar-benar representatif.

We see information massively flew and the need for organizing data/ supporting documents for justice significantly increased. It drives us to change the old school of storing, documenting, organizing, and using data. The characteristics of hyperconnected society are also reflected in our world of justice. Every court requires supporting data for planning, management, and capacity building for judges and court officials. Hence, we all extremely need the connection of data/documents with each other, where the amount of data/ documents very enormous, so we need different representative ways of handling and availability of instruments.

Orkestrasi (dalam) Manajemen Pengadilan

Orchestrating Court Management

Salah satu cara, menurut Rhenald Kasali, dalam mengantisipasi perubahan-perubahan fundamental dalam Industri 4.0 adalah orkestrasi (orchestration). Orkestrasi adalah seni menata dan memanfaatkan setiap sumber daya atau potensi yang ada agar dapat berjalan seiring dan membantu pencapaian tujuan. Jika kita perhatikan dalam suatu pertunjukan orkestra, sang kondektur dengan piawai menyelaraskan banyak alat musik dan pemainnya yang dalam benak umum sulit untuk dipadukan satu sama lain. Dengan kelihaiannya seorang kondektur, maka hal-hal itu justru menjadi mungkin dan bahkan menghasilkan sesuatu yang lebih indah.

Rhenald Kasali emphasize the importance of anticipating fundamental changes in Industry 4.0 is orchestration. Orchestration is the art of organizing and utilizing every available resource or potential so that it can go hand in hand and help achieve goals. If we have a closer look an orchestra performance, the conductor skillfully harmonizes many musical instruments and players but we see it too difficult to integrate them. A conductor, once again, makes those things possible and even produce something more beautiful.

Demikian pula dalam manajemen, seorang pemimpin dituntut untuk dapat menghamoniskan segala potensi yang ada di lembaganya. Kebijakan-kebijakan pimpinan dan pendekatan terhadap sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki menentukan keberhasilan manajemen dalam suatu lembaga.

Likewise in management, a leader is required to utilize the entire resources. Leadership policies and approaches to their resources determine the success of management in an institution.

Pimpinan Pengadilan (Ketua dan Wakil Ketua) wajib memiliki kemampuan orkestrasi terhadap segenap sumberdaya yang dimiliki. Di tingkat satuan kerja misalnya, pimpinan wajib untuk mengetahui setiap potensi yang dimiliki para Hakim dan aparatur lainnya. Pimpinan wajib pula mengidentifikasi potensi dan sumber daya fisik yang dimiliki, memetakan kebutuhan pemanfaatan teknologi informasi, mendesain penerapannya, serta memastikan keseluruhan dapat berjalandenganbaik. Adapun Pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan pembinaan dan pengawasan lembaga peradilan perlu merumuskan kebijakan yang mencerminkan orkestrasi potensi-potensi yang dimiliki dan merancang suatu tata kelola kelembagaan yang memastikan setiap elemen berjalan dengan baik.

The court leadership (Chief Judge and Vice Chief Judge) should have the ability to orchestrate all the resources they have. In every court of the first instance, the leadership is obliged to identify every potential of Judges and court officials. The leadership should also identify the potentials and physical resources they have, mapping the needs of the use of information technology, promoting its application, and ensure the whole aspect effectively operates. The appellate court as the front guard for guiding and supervising the judiciary, needs to formulate policies that reflect the orchestration of potentials and design an institutional governance that ensures each element runs well.

Proyeksi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Vision of Bandar Lampung Religious High Court

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyadari benar pentingnya mereformulasi tata kelola manajemen lembaga peradilan. Disrupsi dalam berbagai segi kehidupan memaksa kita untuk memikirkan cara-cara baru dalam tata kelola kelembagaan. Pesatnya perkembangan teknologi harus direspon dengan memanfaatkan sebaik mungkin perangkat teknologi yang ada, apalagi dalam masa pandemic Covid-19, segala sesuatu harus ditata ulang agar roda kelembagaan tetap berjalan. Karena itu, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memproyeksikan beberapa kerangka kebijakan umum yang mewakili orkestrasi manajemen lembaga peradilan.

The Bandar Lampung Religious High Court fully aware the importance of reformulating the governance management of the judiciary. Disruption in various aspects of life forces us to think new ways of management. The rapid development of technology must be responded by maximizing the use of technological devices, especially during the Covid-19 pandemic, everything must be reorganized to insist our court keeps running. Therefore, the leadership of the Bandar Lampung Religious High Court projects several general policy frameworks representing the orchestration of court management.

Pertama, pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan rutin pembinaan dan pengawasan di seluruh satuan kerja. Platform kegiatan pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilakukan melalui pengawasan langsung ke satuan kerja perlahan dikurangi frekuensinya dan diganti

Fokus Utama

dengan pembinaan dan pengawasan virtual dengan memanfaatkan aplikasi terkait dan ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi. Terlebih di masa pandemi Covid-19, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tetap rutin melaksanakan pembinaan dan pengawasan rutin agar proses dan kinerja seluruh satuan kerja tetap terpantau dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut, selain tetap menjaga efektivitas kegiatannya, juga mampu memangkas penggunaan anggaran. Hal ini penting, karena anggaran yang tersisa dapat dikelola lebih lanjut untuk kepentingan lembaga.

First, the use of information technology in routine coaching and supervising courts of the first instance. The frequency of direct guidance and supervision activities platform has gradually reduced and replaced with virtual guidance and supervision by utilizing related applications and the availability of information technology infrastructures. Particularly, in the Covid-19 pandemic, The Bandar Lampung Religious High Court virtually continued to carry out routine guidance and supervision to insist all courts remained well monitored. The use of information technology, in addition to maintaining the effectiveness of its activities, is also able to cut the use of budget. It is very important to address, because the remaining budget can be managed further for the benefit of the institution.

Kedua, memaksimalkan potensi dari para Hakim dan aparaturnya pengadilan dalam merumuskan inovasi-inovasi terbaru guna merespon perkembangan zaman dan ekspektasi terhadap lembaga peradilan yang

tinggi. Inovasi-inovasi yang diciptakan kemudian fokus pada pemberdayaan kapabilitas intelektual dan etik dari para Hakim dan aparaturnya pengadilan lainnya. Proyeksi ini mengedepankan proses bottom up, yaitu mendorong pemunculan gagasan dari setiap aparaturnya di satuan kerja untuk kemudian dibahas oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Second, maximizing the potential of Judges and court officials in formulating the latest innovations in response the changing times and expectations of increasingly high judicial institutions. The innovations created then focus on empowering the intellectual and ethical capabilities of Judges and other court officials. This projection emphasizes the bottom up process, which encourages ideas from each apparatus of the court to be discussed later by the leadership of The Bandar Lampung Religious High Court.

Ketiga, penyusunan strategi tata kelola media (media management) dalam upaya meningkatkan citra baik Pengadilan di mata masyarakat serta memperlancar proses diseminasi informasi-informasi penting terkait lembaga pengadilan dan perkembangan terbaru dalam dunia penegakan hukum. Tata kelola media ini melibatkan seluruh unsur yang memiliki kapabilitas untuk itu. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memastikan potensi-potensi terbaik tersebut dapat berkontribusi nyata bagi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan Pengadilan Agama sewilayah Lampung dan bagi dunia peradilan di Indonesia pada umumnya.



Contoh orkestrasi poin ketiga ini adalah terbitan rutin majalah dua Bahasa Tribunal yang menjadi instrumen diseminasi informasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kepada publik.

Third, preparation of a media management strategy as an effort to improve court image and expedite the process of disseminating important information about court and the latest developments of law enforcement. This media management involves all elements of the court. The Bandar Lampung Religious High Court ensured that the best cadres could contribute significantly to the Bandar Lampung Religious High Court, Religious Court around Lampung Province, and to the judiciary in Indonesia. An example of the third point orchestration is the regular publication of Tribunal bilingual magazine as an instrument for disseminating information on the Bandar Lampung Religious High Court to the public.

Keempat, teknologi informasi sedemikian rupa dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Hakim memegang peranan sentral dalam hal ini. Karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengarahkan agar setiap Hakim mampu memanfaatkan teknologi informasi sedemikian rupa sehingga menunjang kinerjanya dalam menyelesaikan setiap perkara secara cepat, tepat, dan efektif. Bahkan, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung beberapa waktu lalu telah melakukan gebrakan dengan mengadakan diskusi hukum terkait persidangan elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung secara rutin (setiap 3 bulan sekali) mengadakan diskusi hukum bagi Hakim dan tenaga teknis guna memperkuat pemahaman dan kapabilitas mengenai norma dan penerapan hukum formil dan hukum materil. Ini merupakan bentuk orkestrasi dalam pengembangan sumberdaya manusia (Hakim dan aparatur pengadilan) dalam memaksimalkan fungsi utama lembaga peradilan.

Fourth, information technology is used to improve the performance of case disposal. Judges play a significant role in this matter. Therefore, the Bandar Lampung Religious High Court insist every Judge be able to utilize information technology to support his performance quickly, accurately, and effectively. In fact, The Bandar Lampung Religious High Court has made a breakthrough by holding legal discussions related to electronic trials and the use of electronic signatures. In addition, the Bandar Lampung Religious High Court routinely (every 3 months) holds legal discussions for Judges and technical officials to strengthen understanding and capability regarding norms and the application to both of procedural and substantive law. It represents orchestration of human

resources management (Judges and court officials) in maximizing the main functions of the judiciary.

Kelima, menyeimbangkan aspek pekerjaan dengan kehidupan pribadi, fisik dan psikis, rutinitas dengan religiusitas. Setiap Hakim dan aparatur Pengadilan wajib memerhatikan keseimbangan dalam hidup mereka. hidup yang seimbang akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Karena itu, dalam menjalani rutinitas di kantor, setiap Hakim dan aparatur perlu mengambil jeda setelah beberapa waktu tertentu, misalnya setiap jam melakukan rileksasi dengan senam jari, peregangan kaki dan pundak, atau sekadar berjalan ke suatu tempat untuk melonggarkan saraf. Di tengah rutinitas, mengambil jeda sejenak untuk mengingat Tuhan, mendengarkan musik, atau sekadar berbincang ringan dengan kolega. Hal-hal sederhana ini akan sangat menopang kinerja dari setiap Hakim dan aparatur Pengadilan. Karena, di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang sehat, yaitu jiwa yang senantiasa optimis dalam bekerja.

Fifth, balancing aspects of daily routine with personal life, physical and psychological life, daily routine with religiosity. Every Judge and Court officer should emphasize their life balance. a balanced life will significantly influence performance. Therefore, in carrying out routine in the office, every Judge and officer need to take a break after a certain amount of time, for example every hour to relax with finger exercises, stretching legs and shoulders, or just walking to a place to loosen nerves. In the midst of routine, take a short break to remember God, listening music, or just having chat with colleagues. These simple things will greatly support the performance of every Judge and Court apparatus. Because, in a healthy body there is a healthy soul, soul that is always optimistic at work.

Pembinaan Hakim Baru se-Wilayah Lampung

(Inklusi Etik, Budaya Kerja, dan Dedikasi Penegakan Keadilan)

The Coaching of New Judges in Lampung Region (Ethical Inclusion, Work Culture, and Justice Enforcement Dedication)



Terhitung sejak April 2020, sebanyak 43 Hakim angkatan VIII resmi bertugas di berbagai satuan kerja Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Lampung. Para Hakim tersebut berasal dari berbagai daerah dan mengisi kekurangan formasi Hakim yang selama ini menjadi masalah bersama di wilayah Lampung. Dengan bertambahnya 43 orang Hakim tersebut, pengadilan-pengadilan di Lampung memiliki potensi besar untuk mempercepat proses penanganan perkara dan memberi suntikan semangat bagi penegakan hukum dan keadilan.

Since April 2020, 43 judges batch VIII officially have worked in work units of the Religious Courts in Lampung Province. The judges come from various regions and fill the shortcomings of judge formations which was a common problem in the Lampung region. With

the addition of 43 Judges, the courts in Lampung have great potential to speed up the process of handling cases and give spirit injections to law enforcement and justice.

Harapan akan peningkatan kinerja dan meningkatnya citra pengadilan, sedikit banyak bertumpu pada para Hakim baru ini. Karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyadari pentingnya tatap muka dan pembinaan kepada para Hakim tersebut agar memiliki visi yang sama ke depan dalam meningkatkan kinerja Lembaga peradilan. Atas dasar pikir inilah, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengadakan kegiatan pembinaan virtual kepada para Hakim baru dengan mengangkat tema pembinaan yang inklusif, yaitu menyelaraskan etika, budaya kerja, dan dedikasi terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Expectations of improved performance and improved court image are more or less rely on the new Judges. Therefore, the Bandar Lampung Religious High Court realizes the importance of face-to-face and coaching for the new Judges to have the same vision in improving the performance of the judiciary. Because of this, the Bandar Lampung Religious High Court held virtual coaching for the new Judges with the theme of inclusive coaching, which is to harmonize ethics, work culture, and dedication to law enforcement and justice.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. dan Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan tersebut.

Vice Chief Judge of the Bandar Lampung Religious High Court, Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. and Secretary of the Directorate General of the Religious Courts, Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M. were the guest speakers in the coaching.

Dalam penyampaian, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyampaikan beberapa hal. Pertama, para Hakim diminta agar memperhatikan dan memahami dengan baik kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Selain itu, mereka diminta menjaga kerapian selama di lingkungan kantor karena Hakim adalah teladan bagi seluruh aparaturnya pengadilan.

*In her speech, the Deputy Chair of the Bandar Lampung Religious High Court conveyed several things. **First**, the New Judges were asked to pay attention and understand well the code of ethics and the Code of Conduct of the Judge. In addition, they were asked to maintain tidiness while in the office environment because a Judge was a role model for all court officials.*

Kedua, beliau menjelaskan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam hal pembinaan dan pengawasan teknis yudisial dan administrasi umum. Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses yang terjadi di seluruh pengadilan agama yang menjadi yurisdiksinya.

***Second**, she explained the authority of the Bandar Lampung Religious High Court in terms of judicial technical guidance and supervision and general administration. The Bandar Lampung High Religious Court is responsible for ensuring the smooth processes that occur in all religious courts which become its jurisdiction.*

Ketiga, beliau berpesan agar para Hakim tidak berpuas diri dengan ilmu dan kemampuan yang dimiliki saat ini. Penegakan hukum itu dinamis, karenanya mereka diharapkan selalu mengembangkan keahlian teknisnya.





Third, she advised the New Judges not to be complacent with the knowledge and abilities they have today. Law enforcement is dynamic, so they are expected to always develop their technical expertise.

Sementara itu, Sekretaris Badilag, dalam pembinaannya, menyampaikan beberapa hal terkait dengan manajemen dan keroganisasian. Pertama, beliau berpesan bahwa "sukses adalah milik kita yang menyiapkan hari ini". Tidak ada kesuksesan yang lahir secara instan. Sebaliknya, setiap kesuksesan mempersyaratkan persiapan dan konsistensi dalam menjalani setiap prosesnya.

Meanwhile, Secretary of Badilag, in his coaching, conveyed several matters related to management and organization. **First**, he believes that "success is ours who is preparing today". There is no success that is born instantly. Every success requires preparation and consistency in going through each process.

Kedua, para Hakim diharapkan dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai organisasi, yaitu bersyukur, pelayanan prima, profesional, disiplin, kredibilitas, kompetensi, kompetitif, kepedulian, keterbukaan, kebersamaan, inovatif. Nilai-nilai tersebut penting dalam menjalankan profesi dan membangun budaya organisasi yang konstruktif.

Second, the Judges are expected to understand and implement organizational values, like gratitude, excellent service, professionalism, discipline, credibility, competence, competitive, caring, openness, togetherness, and innovative. These values are important in carrying out the profession and building a constructive organizational culture.

Ketiga, setiap profesi pasti ada risiko. Setiap kita yang menjalani profesi tersebut memiliki pilihan dalam bekerja. Pilihan hanya ada tiga, yaitu bad job, good job, excellent. Pilihlah bekerja dengan baik yang hasilnya juga baik, jangan selalu bertumpu pada zona nyaman karena itu sesungguhnya penjara bagi setiap orang yang ingin sukses.

Third, every profession has risks. Every one of us who goes through the profession always has a choice at work. There are only three choices, bad job, good job, and excellent job. Choose to work well with good results, don't always rely on the comfort zone because actually it's a prison for everyone who wants to succeed.

Keempat, suatu keniscayaan bagi setiap orang untuk selalu beradaptasi dengan lingkungannya. Para Hakim dituntut untuk dapat beradaptasi dengan situasi baru di kantornya. Adaptasi yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dengan demikian kinerja para Hakim akan meningkat secara terus-menerus.

Fourth, it is a necessity for everyone to always adapt to their environment. The Judges are required to be able to adapt to the new situation in his office. Good adaptation will create a conducive work environment, thus the performance of Judges will improve continuously.

Kelima, para Hakim diharapkan dapat mengamalkan beberapa nilai hidup seperti mengucapkan terima kasih, memikirkan yang seharusnya dipikirkan dan bukan memikirkan komentar orang lain, serta focus pada tujuan yang telah ditetapkan.

Fifth, Judges are expected to be able to apply some values of life such as saying thank

you, thinking about what should be thought and not thinking too much about other people's comments, and focusing on the goals set.

Keenam, para Hakim diharapkan dapat memperhatikan dan melaksanakan kode etik dan pedoman perilaku Hakim dengan baik dan konsisten. Kode etik adalah rambu-rambu yang menjaga Hakim dari setiap ucapan, sikap, dan perilaku yang dapat mencemari keluhuran martabat profesi Hakim.

Sixth, the judges are expected to be able to pay attention and implement the code of ethics and guidelines for the judge's behavior properly and consistently. The code of ethics is a signpost that protects the judge from every utterance, attitude, and behavior that can tarnish the dignity of the judge's profession.

Terakhir, Sekretaris menyampaikan pesan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama agar segera beradaptasi dengan program-program prioritas dari Direktorat seperti implementasi SIPP, e-court, 11 inovasi, Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), dan Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan sebagainya.

Finally, the Secretary conveyed the message of the Director General of the Religious Courts to immediately adapt to priority programs from the Directorate such as the implementation of SIPP, e-court, 11 innovations, Quality Assurance Accreditation (APM), and Integrity Zone Development (ZI), and so on.

Sesi pembinaan virtual ini tidak hanya berjalan satu arah, melainkan dua arah. Para Hakim yang mengikuti kegiatan diajak untuk berinteraksi secara langsung dan menyampaikan pendapatnya. Sesi pembinaan berlangsung santai namun tetap mengedepankan tercapainya tujuan pembinaan itu sendiri. Tema inklusif yang diusung terlaksana dengan baik selama pembinaan berlangsung. Para Hakim mendapatkan bekal teknis yudisial dan konsep kelembagaan yang utuh. Dari kegiatan ini, diharapkan para Hakim yang baru dilantik dapat menjaga integritas dan kinerjanya serta menjadi panutan di kantornya masing-masing.

"This virtual coaching session did not only go in one direction, but in two directions. The Judges who take part in the activity are invited to interact directly and express their opinions. The coaching session was relaxed but still prioritized the achievement of the training itself. The inclusive theme was carried out well during the coaching. The judges received judicial technical provisions and the concept of an integrated institution. From this activity, it is hoped that the newly appointed Judges can maintain their integrity and performance also become the role model in their own offices"



LAUNCHING

of Maiden issue of the Tribunal bilingual magazine

Peluncuran Edisi Perdana Majalah Dua Bahasa "Tribunal"



Majalah dua bahasa 'Tribunal' resmi diluncurkan pada tanggal 24 Februari 2020, bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Memanfaatkan kecanggihan Command Center, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Aco Nur, S.H., M.H. meluncurkan secara resmi majalah 'Tribunal' di hadapan beberapa Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia. Peluncuran ini merupakan satu rangkaian kegiatan dari kegiatan pembinaan rutin Direktur Jenderal secara rutin terhadap Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. /IDN

'Tribunal' bilingual magazine was officially launched on February 24, 2020, along with the anniversary of the Bandar Lampung Religious High Court. Utilizing the sophistication of the Command Center, Director General of the Religious Courts Agency, Dr. Aco Nur, S.H., M.H. officially launched 'Tribunal' in the presence of several Chief Judges of the Religious High Court. This launch is a series of the routine coaching of the Director General on Religious Courts throughout Indonesia. /ENG

Dalam sambutannya pada acara peluncuran tersebut, Direktur Jenderal sangat mengapresiasi terobosan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang berhasil meluncurkan edisi perdana majalah dua bahasa ini. Ia bahkan mendukung penuh keberlanjutan penerbitan edisi-edisi berikutnya karena ini menjadi inovasi yang langka di dunia peradilan. Sangat sedikit publikasi peradilan yang disajikan dalam dua bahasa, bahkan mungkin belum ada. Direktur Jenderal bahkan secara langsung meminta kepada Tim Majalah agar beberapa eksemplar diberikan ke Badilag untuk menjadi arsip dan dijadikan sebagai buah tangan bagi tamu-tamu dari dunia internasional. / IDN



At the launch event, the Director General highly appreciate the breakthrough of the Bandar Lampung Religious High Court, which successfully launched the inaugural edition of the bilingual magazine. He even fully supports the continuation of the subsequent issuance because this has become a rare innovation in judiciary. Very few judicial publications are presented in two languages, maybe not even yet. The Director General even directly asked the Magazine Team that some copies be given to Badilag to be archived and used as souvenirs for international guests. /ENG





Bersamaan dengan peluncuran oleh Direktur Jenderal Badilag tersebut, versi cetak majalah Tribunal ditampilkan di booth Badilag pada even ‘Pameran Kampung Hukum” dan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Antusiasme pengunjung sangat tinggi terhadap kehadiran majalah ini. Terbukti dari ludesnya majalah yang dipamerkan di booth Badilag, karena diminati oleh para pengunjung.

"Along with the launch by the Director General, the printed version of the magazine was displayed at the Badilag booth at the 'Kampung Hukum Exhibition' and the 2019 Supreme Court Annual Report at the Jakarta Convention Center. The enthusiasm of visitors is very high towards the presence of this magazine. During the event, magazine has sold out due to high demand by visitors."

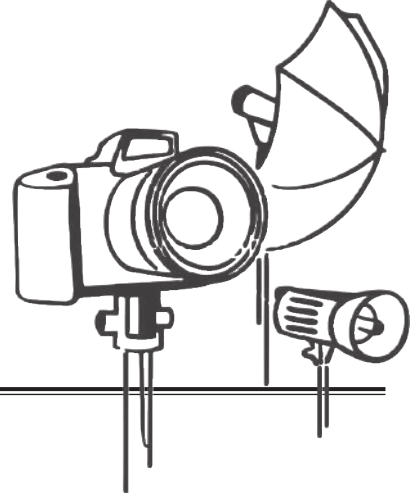




Edisi perdana mengangkat sejumlah tema sentral. Pertama, rangkuman peristiwa penting di pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah Lampung. Kedua, ulasan tentang manajemen lembaga peradilan yang berorientasi pada melayani seluruh masyarakat secara adil. Ketiga, pemaparan tentang riwayat Pengadilan Agama sebagai motor pembaruan peradilan di Indonesia. Ada sejarah panjang yang perlu diketahui mengenai bagaimana Pengadilan Agama mampu menjadi motor penggerak pembaruan peradilan di Indonesia di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan secara umum. /IDN

The inaugural edition raised a number of central themes. First, a summary of important events in the courts in the Lampung region. Second, a review of the management of judicial institutions that are oriented towards serving the entire community fairly. Third, the presentation of the history of the Religious Courts as a motor for judicial reform in Indonesia. There is a long history that needs to be known about how Religious Courts are able to become a pioneer for judicial reform in Indonesia amidst low public confidence in the performance of the judiciary in general. / ENG





Pengadilan Agama Tanjung Karang

Tanjungkarang Religious Court



Pemberian *Reward* Kepada Tim Keuangan PA Tanjungkarang

Senin 16 Maret 2020, usai pelaksanaan apel pagi, Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang, Drs. H. EDIWARMAN, S.H., M.H.I memberikan reward dan apresiasi kepada Tim Keuangan PA Tanjungkarang atas prestasi yang telah diraih menjadi Satuankerja Terbaik I atas penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dipa 402325 Tahun 2019 Katagori Konversi Bobot 80% dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bandarlampung.

Ketua PA Tanjungkarang berpesan agar prestasi tersebut dapat dipertahankan, dan agar Pegawai yang lain dapat lebih meningkatkan kinerja agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. /IDN

Reward Ceremony for Finance Team of Tanjungkarang Religious Court

On Monday, March 16 of 2020, after Monday routine assembly, Chief Judge of Tanjungkarang Religious Court, Drs. H. Ediwarman, S.H., M.H.I, awarded and appreciated the finance team of Tanjungkarang Religious Court for achieving the first rank of implementation performance indicator of the 402325 2019 DIPA (Budget Implementation Checklist) on the category of 80% quality conversion from Bandarlampung State Treasury Service Office.

Chief Judge of Tanjungkarang Religious Court reminded the team to maintain their achievement. Furthermore, he reminded other court officers to improve their performance for their better future./ENG



Sosialisasi Cuti Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Cuti Pegawai di PA Tanjungkarang

26 September 2019, PA Tanjungkarang menyelenggarakan Sosialisasi Cuti Hakim dan Pegawai. Kegiatan dimulai pukul 14.00 s/d 15.30 WIB, di Ruang Aula PA Tanjungkarang. Materi diberikan oleh Suci Rahayu Ningsih, S.Sos. (CPNS PA Tanjungkarang) dalam rangka menyelesaikan Tugas Aktualisasi Peserta Latsar CPNS Gol II di BPSDMD Sumatera Selatan.

Materi Sosialisasi Cuti tersebut menjelaskan tentang tata cara Cuti bagi Hakim dan Pegawai, sebagai mana Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Cuti kepada Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Kegiatan Sosialisasi dilanjutkan dengan pemberian informasi tentang Cuti yang di Upload pada Sub Menu Informasi Cuti pada Website Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam rangka optimalisasi pengelolaan cuti Pegawai di PA Tanjungkarang. /IDN

Dissemination of officer leave regulation for a systematic leave management in Tanjungkarang Religious Court

On September 26 of 2019, Tanjungkarang Religious Court disseminated leave regulation for Judges and court officers. Took place in Tanjungkarang Religious Court main lobby, it started on 2.00 – 3.30 p.m. Suci Rahayu Ningsih, S.Sos. was the presenter of the event (state official candidate) as the part of her actualization on basic training for the grade II state official candidate in BPSDMD of South Sumatera.

Presenter explained the procedure of filing leave request for Judges and court officers. It refers to Circular Letter of Secretary of The Supreme Court Number 13 of 2019 on Procedure of Granting Leave Approval for Judges and Supreme Court Officers and Its Court. It then followed by providing information of filing leave request which is available on the website menu. /ENG



Alhamdulillah.. PA Metro Raih Lima Penghargaan Sekaligus

Pada saat pelaksanaan Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ke 27, tanggal 24 Februari 2020. Diumumkan pemenang dari berbagai kategori yang perlombaan yang digelar. Dan Alhamdulillah, PA Metro berhasil meraih 5 dari 11 cabang perlombaan yang ada, yaitu:

- Juara 1 Upload putusan
- Juara 1 Penyelesaian Perkara
- Juara 1 Dekorasi Ruang Sidang
- Juara 1 Website
- Juara 2 Penilaian Prestasi Operator SAIBA, SIMAK-BMN dan Barang Persediaan.

Hal ini tentu saja merupakan kebanggaan dan menjadi motivasi bagi PA Metro agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta terwujudnya Zona Integritas di PA Metro. / IDN

Metro Religious Court Received 5 Awards

24 February 2020 was the 27th anniversary for Bandarlampung Religious High Court. Celebrating this memorable moment, Bandarlampung Religious High Court announced and awarded the winner for each category of its contests. Metro Religious Court embraced 5 out of 11 categories, as follows:

1st rank for decision uploading

1st rank for case disposal

1st rank for court room make over

1st rank for website management

2nd rank for operator of SAIBA, SIMAK-BMN and Supply.

These all are definitely pride for Metro Religious Court and highly motivate for giving better services for all of justice seekers. Hereinafter, these are also encouraging to reach Integrity Zone predicate. /ENG

Hakim Pengadilan Agama Metro kelas I A Raih Peringkat Pertama Pelatihan English Effective Presentation

Prestasi kembali diraih oleh Pengadilan Agama Metro atas keberhasilan Hakim Madya Utama, Drs. Aminuddin karena telah meraih peringkat pertama dalam Pelatihan *English Effective Presentation* bagi Hakim Juru Bicara Pengadilan di PUSDIKLAT Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor.

Penetapan Peserta Terbaik diumumkan dalam Acara Penutupan Mentoring Leader (*Leader As A Coach*) bagi Ketua/Kepala Pengadilan dan Pelatihan *English Effective Presentation* bagi Hakim Juru Bicara Pengadilan oleh Panitia Penyelenggara Kabid PUSDIKLAT Manajemen dan Kepemimpinan Bapak R. Yustiar Nugrorho, S.H., M.H. tanggal 18 Maret 2020 di PUSDIKLAT MARI Megamendung, Bogor.

Tentu saja keberhasilan ini memberikan motivasi lebih ke seluruh Pimpinan, Hakim dan pegawai Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur Pengadilan Agama, terlebih saat ini seluruh pegawai sedang bahu membahu berusaha bersama untuk mewujudkan Zona Integritas di Pengadilan Agama Metro. /IDN



MAHKAMAH AGUNG RI
PENUTUPAN
PELATIHAN MENTORING LEADER (LEADER AS A COACH) BAGI KETUA / KEPALA PENGADILAN
DAN PELATIHAN ENGLISH EFFECTIVE PRESENTATION
BAGI HAKIM JURU BICARA PENGADILAN
pusdiklat.menpim.ma.2
Megamendung, 18 Maret 2020

Judge of Metro Religious Court Achieve 1st Rank on English Effective Presentation Training

Another great achievement has inscribed by Metro Religious Court. Associate Judge, Drs. Aminuddin, achieved 1st rank on English Effective Presentation training for PR Judge held by Center for Education and Training of the Supreme Court.

The decision of the best participant has announced on Closing Ceremony of Mentoring Leader (Leader As A Coach) for Chief Judge and English Effective Presentation Training for PR Judge. The event held by Committee of Education and Training Center for Management and Leadership led by R. Yustiar Nugrorho, S.H., M.H. It took place at Education and Training Center Buildings on March 18th of 2020.

Obviously, this achievement massively motivates for top leader, Judges, and court officers of Metro Religious Court in providing excellent services and promoting effort for Integrity Zone predicate. / ENG



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A



Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Memeriksa Perkara Di Pengadilan Agama Gunung Sugih

PA Gunung Sugih melakukan berbagai terobosan dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara serta untuk merespon upaya penyelesaian perkara secara elektronik sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Salah satu terobosan itu ialah dengan diadakannya persidangan secara e-litigasi sekaligus persidangan dengan menggunakan sambungan audio-visual (teleconference). Hal ini dilakukan salah satunya oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Sobari, S.H.I., dengan anggota majelis Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., dan Uswatun Hasanah, S.H.I., M.H., teleconference dilaksanakan karena alasan *force majeure* dimana salah satu pihak (Pemohon) berada di luar daerah dan 'terkena' kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Persidangan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 antara PA Gunung Sugih dengan PA Cilegon, dimana pihak Pemohon berada. /IDN

Utilization of Information Technology on Judicial Administration in Gunung Sugih Religious Court

Gunung Sugih Religious Court made several breakthroughs in accelerating case clearance rate and responding electronic-base court administration. It is implementation of Supreme Court Rule Number 1 of 2019 on Electronic Court Administration and Chief Justice Decree Number 129/KMA/SK/VIII/2019 on Technical Instruction of Electronic Court Administration and Trial.

One of these breakthroughs was e-litigation and trial by teleconference. The trial held by Judges Assembly led by Sobari, S.H.I with judge member Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I and Uswatun Hasanah, S.H.I. Trial held by using teleconference due to a force majeure which one of parties (plaintiff) was outside the court jurisdiction and unable to travel due to PSBB (Massive Scale of Social Distancing). The trial held on Tuesday, May 19th of 2020, where the plaintiff joined teleconference by using facility in Cilegon Religious Court. / ENG



Pengadilan Agama Gunung Sugih Peduli COVID 19

Dampak sosial ekonomi akibat Corona Virus Disease 19 (Covid 19) juga dirasakan oleh masyarakat Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Melihat kondisi tersebut, keluarga besar Pengadilan Agama Gunung Sugih menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak Covid 19 yang berada di sekitar kantor PA Gunung Sugih. Kepedulian itu diwujudkan dengan memberikan bingkisan berisi bahan makanan serta masker.

Acara dengan tema "Santunan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19" itu dilaksanakan pada hari Jum'at 15 Mei 2020 bertepatan dengan pekan terakhir bulan suci Ramadhan 1441 Hijriyah. Acara tersebut digelar di ruang tunggu PA Gunung Sugih dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, Dra. Hj. Sartini, S.H.,M.H, Para Hakim, Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai PA Gunung Sugih, serta para tamu undangan. Penyerahan bingkisan secara simbolis oleh ketua PA Gunung Sugih Dra. Hj. Sartini, S.H.,M.H. kemudian dilanjutkan dengan pembagian bingkisan bahan makanan dan masker dari para pegawai PA Gunung Sugih kepada para tamu undangan.

Acara tersebut menerapkan aturan protokol covid 19 seperti physical distancing dan pemakaian masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer. /IDN

Gunung Sugih Religious Court Conducted Charity Regarded Covid-19 Outbreak

Covid-19 outbreak has massively pushed social-economy. It also affects people in Gunung Sugih Regency, Central Lampung. For that reason, all of Gunung Sugih Religious Court officers promote their cares by giving parcel and also face mask.

The event bring up main theme: "Social Compensation for Covid-19 – Affected People" and held on Friday, may 15th 2020. It was exactly on Ramadhan of 1441. Chief Judge, Dra. Hj. Sartini, S.H.,M.H, Associate Judges, Registrar, Secretary, court officers attended the event. Parcel officially first given by Chief Judge and then followed by other parcel and face mask given by court officer to all of beneficiaries.

Besides, the event held by implementing Covid-19 protocol such physical distancing, using face mask, washing hands, and routinely using hand sanitizer. /ENG



Pelantikan Hakim di Masa Covid-19

Senin 18 Mei 2020, bertempat di ruang sidang utama PA Kalianda, dilaksanakan acara pelantikan hakim yang dihadiri oleh sebagian hakim dan pegawai PA Kalianda dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dalam kegiatan tersebut Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H. (Ketua PA.Kalianda) melantik Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. sebagai hakim di Pengadilan Agama Kalianda. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 93/KMA/SK/III/2020 Tentang Promosi Dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, tanggal 23 Maret 2020.

Sebelum bertugas di PA Kalianda Kelas IB, AL-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H. bertugas sebagai Ketua di Pengadilan Agama Boroko Kelas II.

Dalam sambutannya Ketua PA Kalianda menyampaikan selamat datang kepada Hakim yang baru dilantik semoga bisa segera beradaptasi dan lebih bersinergi dalam melaksanakan tugas bersama seluruh jajaran di PA Kalianda. /IDN

Inauguration of New Judge in Covid-19 Outbreak

On Monday, May 18 of 2020, took place in main courtroom, Kalianda Religious Court held Judge Inauguration by implementing Covid-19 protocol. Chief Judge, Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H., officially inaugurate Al-Ansi Wirawan, S.Ag., M.H as The Associate Judge. He was Chief Judge in Boroko Religious Court.

Chief Judge welcoming the new Associate Judge. She expected him to immediately adjust and blend in with all of Judges and court officers. /ENG

Launching Inovasi :

"BOLAPOLI" PA Kalianda



Senin tanggal 8 Juni 2020, pukul 13:30 WIB. Bertempat di ruang sidang utama PA Kalianda diadakan sosialisasi inovasi "Bolapoli" (Booking Pelayanan Produk Pengadilan dan Cari informasi) PA Kalianda. Layanan informasi Bolapoli meliputi:

1. Booking Akte cerai
2. Booking Salinan Putusan
3. Booking Informasi

Inovasi Bolapoli di masa covid-19 ini, adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menunggu terlalu lama di Kantor PA kalianda. sebagai mana protol kesehatan yang berlaku, maka cukup dengan mengakses aplikasi Bolapoli ini masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang berupa hari, tanggal, jam pengambilan produk Bolapoli. Masyarakat cukup kirim ke aplikasi Whatsapp (WA) ke Nomor 0822 8116 0844 dan silahkan untuk ikuti petunjuk dan perintah di aplikasi Bolapoli. / IDN

Official launch of Bolapoli App

On Monday, June 8 of 2020, took place in main courtroom, Kalianda religious Court disseminate information about brand-new app called "Bolapoli" (Booking fo Court Document and Information Request Service). It consist of three main features:

1. *Divorce Certificate Booking*
2. *Official Copy of Court Decision Booking*
3. *Information Booking*

This innovation responds Covid-19 outbreak. It is aimed to promote ease for public in accessing court services without having himself wait too long in court. As Covid-19 protocol prevents physical contact in public area, public just need to access this app and then getting information they need, such as time for him/her can get their own certificate or other court document at court service desk. Public can contact (send message) via WhatsApp to 082281160844 and follow the instruction provided. /ENG





Pemilihan *Role Model* dan *Agent of Change*

Di awal Februari 2020, PA Tanggamus melaksanakan kembali pemilihan *Role Model* dan *Agent of Change*, yang dilaksanakan di ruang sidang PA Tanggamus, dengan dihadiri oleh seluruh Pegawai PA Tanggamus.

Ketua PA Tanggamus Drs. H. Asrori, SH., MH, memberikan arahan bahwa bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang secara otomatis merupakan *role model* di lingkungan kerjanya, maka seharusnya seorang *role model* harus menjadi uswah bagi bawahannya dan bagi seluruh pegawai. Di samping itu, PA Tanggamus juga harus memiliki *agent of change* sebagai mana petunjuk dan implementasi dari Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pembangunan Zona Integritas, yang merupakan orang berdedikasi tinggi untuk Pengadilan, memiliki spirit kemajuan, inovasi dan motivator penggerak di lingkungan kerjanya.

Role Model yang terpilih untuk Kriteria Profesional adalah Drs. H. Asrori, SH., MH., Integritas Drs. M. Ihsan, SH., MH., sedangkan untuk kriteria Kejujuran dan Kedisiplinan adalah Zuhri, SH dan Anis Khoirunnisa, S.Ag, MH. Adapun Agen Of Change untuk tahun 2020, dari Kalangan Hakim adalah Maswari, SHI., MHI, Bagian Kepaniteraan Elpina, S.Ag., Kesekretariatan Masnona, SH., dan dari Tenaga honorer Ilhamuddin, S.Kom. /IDN

Voting for Role Model and Agent of Change

Earlier in this February, Tanggamus Religious Court held voting for new role model and agent of change. The event attended by all of judges and court officers.

Chief Judge, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. delivered speech in front of audience. Chief Judge, Vice Chief Judge, Registrar, and Secretary of the court automatically become role model. A role model should be the real model to follow by others. Beside that, Tanggamus Religious Court should have agents of change as the implementation of Quality Assurance Accreditation and Integrity Zone Development. The one chosen as agent of change is he who has dedication, spirit of moving forward, innovator, and motivator in the court.

Role Model for the 2020 are Drs. H. Asrori, S.H., M.H. for Professional category, Drs. M. Ihsan, S.H., M.H. for integrity, and Zuhri, SH dan Anis Khoirunnisa, S.Ag, MH for honesty and discipline. Besides, for the agent of change category, there are four awardee: Maswari, SHI., MHI (Judge), Elpina, S.Ag (registrar unit), Masnona, SH. (secretariat unit), and Ilhamuddin, S.Kom (contract employee)./ ENG

PA Tanggamus *launching* Inovasi 9 Aplikasi Unggulan

Kamis, 27 Februari 2020. Ketua PA Tanggamus, Drs. Hi. ASRORI, S.H., M.H. Melaunching Inovasi 9 Aplikasi Unggulan.

9 Aplikasi Unggulan ini, untuk melengkapi, membackup dan mengimplementasikan aplikasi yang telah diluncurkan oleh Ditjend Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

9 aplikasi unggulan ini merupakan Inovasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tanggamus dalam rangka menunjang pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Adapun 9 Aplikasi Unggulan tersebut antara lain :

1. Aplikasi Nomor Antrian Sidang Elektronik
2. Aplikasi Nomor Antrian PTSP Elektronik
3. Aplikasi Nomor Antrian Posbakum Elektronik
4. Aplikasi Rekapitulasi Data PTSP & Hasil Skm
5. Aplikasi Audio Peringatan Anti Grtaifikasi
6. Aplikasi Audio Apnggilan Sidang
7. Aplikasi TV-Media Center
8. Aplikasi TV-Media Antrian PTSP
9. Aplikasi Delivery Akta Cerai (AC)

Untuk mempermudah menggunakan aplikasi ini, PA Tanggamus telah mencetak buku panduan aplikasi sehingga pelaksana/ user aplikasi baik para aparaturnya PA Tanggamus maupun masyarakat umum dapat dengan mudah menggunakannya. Buku panduan tersebut telah dimuat di website Pengadilan Agama Tanggamus dengan alamat www.pa-tanggamus.go.id



Tanggamus Religious Court Launched 9 Flagship Apps

On Thursday, February 27 2020, Chief Judge of Tanggamus Religious Court, Drs. Hi. Asrori, S.H., M.H., officially launched 9 flagship apps. These all to accomplish, backing up, and implement the previous apps launched by Directorate General of Religious Court Agency of the Supreme Court of Indonesia.

These 9 apps are innovations developed by Tanggamus Religious Court to fully support the development of Integrity Zone toward Free of Corruption Area and Clean and Serving Bureaucracy.

These 9 applications are:
 Electronic trial queue
 Electronic PTSP queue
 Electronic legal aid queue
 Recapitulation of PTSP data and public satisfaction survey
 Anti-gratification audio
 Courtroom call audio
 TV-Media Center
 TV-PTSP queue media
 Divorce certificate delivery

For ease of using these apps, Tanggamus Religious Court has issued manual book for users and/or operator. Public can get it by accessing the official website of the court at www.pa-tanggamus.go.id

Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Blambangan Umpu Religious Court

Pengadilan Agama Blambangan Umpu Tingkatkan Layanan Dengan Aplikasi Gugatan Mandiri

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1322/DJA/HM.01.1/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Gugatan Mandiri, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PA Blambangan Umpu saat ini telah memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang dalam mewujudkan Pelayanan Prima bagi pencari keadilan demi terwujudnya keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Way Kanan yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Aplikasi Gugatan Mandiri yang telah disediakan PA Blambangan Umpu sangat membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Hukum juga menghemat biaya pembuatan gugatan karena disediakan secara gratis. Selain dari itu aplikasi ini juga dapat diakses secara daring (online) yang memungkinkan masyarakat untuk mengaksesnya dimana saja dan kapan saja dengan cara mengklik link situs yang tersedia pada Laman (website) Pengadilan Agama Blambangan Umpu (<https://www.pa-blambanganumpu.go.id/>).

Aplikasi ini berfungsi membantu para pihak pencari keadilan dalam pembuatan Gugatan/ Permohonan secara mandiri dengan mengisi formulir yang tersedia sampai dengan selesai hingga pencetakan Gugatan/ Permohonan. /IDN



Blambangan Umpu Developed Self-Lawsuit App for A Better Service

Regarding Letter of Director General of Religious Court Agency Number 1322/DJA/HM.01.1/4/2020 on Optimizing Self-Lawsuit, One Gate Integrated Service (PTSP), Blambangan Umpu developed infrastructure to fully support excellent service for justice seekers all around Way Kanan Regency.

This app massively help public who has not enough knowledge about law, particularly on how to file a qualified lawsuit and cutting off cost they should pay for a lawsuit, thanks to it's free of charge service. Beside that, it also could be access anywhere and anytime just by clicking the menu available on the website (<https://www.pa-blambanganumpu.go.id/>).

This app helps parties creating lawsuit/request document by theirself. They only need to fill available form and print it out soon after completion. / ENG

Bank BRI Beri Pelatihan Petugas PTSP Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Bank BRI Capem Blambangan Umpu berikan pelatihan *Profesional Receptionis* dan operator Pelayanan bagi petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di PA Blambangan Umpu. Pelatihan dalam bentuk Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) ini dilaksanakan di Kantor PA Blambangan Umpu pada hari Kamis, 19 Maret 2020.

Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H., dalam sambutan pembukaan acara tersebut menyampaikan bahwa, "seluruh pegawai di PA Blambangan Umpu khususnya petugas PTSP, petugas informasi, pelayanan pengaduan, petugas penerimaan perkara, antrian sidang, hingga pemberian produk harus mengerti, paham dan bisa memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan".

Hadir sebagai pemateri dari Bank BRI, Novita, dalam penyampaian materinya menjelaskan tugas Customer Service diantaranya adalah membuat pelanggan merasa penting, melayani dengan ramah, tepat, dan cepat. Selain itu juga, sebagai Customer Service harus mengutamakan kepuasan pelanggan, menempatkan pelanggan sebagai mitra, dan memberikan pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan. Petugas Customer Service harus selalu menambah wawasan dengan membaca dan memahami kondisi dan situasi customer/pelanggan, lanjut Novita.

Kegiatan ini ditutup dengan pemberian cendera mata dan penandatanganan kerjasama antara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI)./ IDN



BRI Trained PTSP staffs of Blambangan Umpu Religious Court

On Thursday, March 19 of 2020, BRI Branch of Blambangan Umpu gave professional receptionist for PTSP staffs in Blambangan Umpu Religious Court. This training is wrapped in direct training on the site.

Chief Judge, Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. delivered opening speech. He said, "All of PTSP Staffs, staff on information, complaint, case registration, courtroom queue, and court document service, should understand and giving excellent services for all of justice seekers".

Novita was the trainer of the event. She delivered main concepts of excellent service. She added, the customer service staff should make customer feel comfortable, get better, exact, and speedy service. Beside that, as a customer service, should put customer satisfaction as his/her priority, making customer as partner, and optimizing quality of service. Furthermore, customer service should always read new literature to get himself/herself updated on customer current circumstances.

The event closed by handing over souvenirs and signing MoU between Blambangan Umpu Religious Court and BRI Branch of Blambangan Umpu. /ENG

PA Gedong Tataan Kembangkan Layanan Formulir Beperkara Berbasis Website

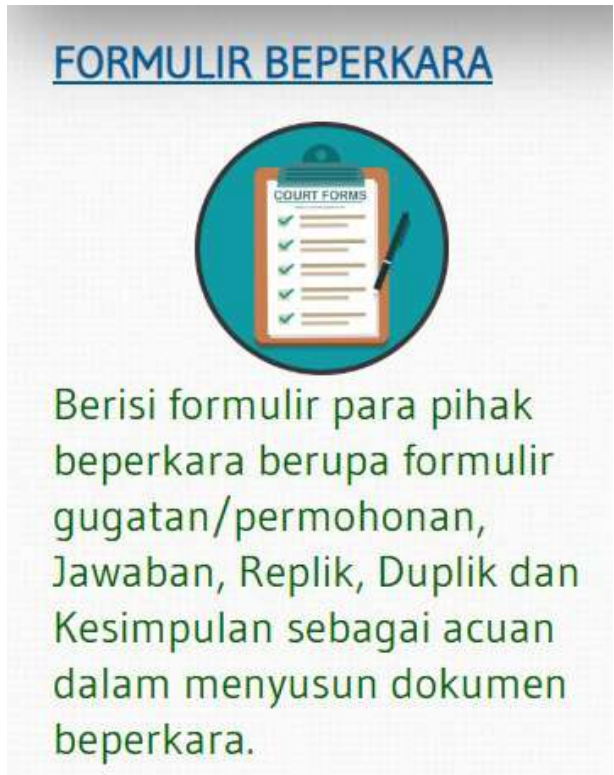
Gedong Tataan Religious Court Developing Website-Based Court Forms

Sejak Januari 2020 lalu, Pengadilan Agama Gedong Tataan mengembangkan suatu layanan untuk membantu para pencari keadilan menyusun dokumen hukum yang diperlukan terkait dengan perkaranya secara mandiri. Layanan tersebut adalah "Formulir Beperkara" yang berbasis website. Layanan ini tersedia secara daring di website resmi Pengadilan Agama Gedong Tataan pada laman <https://www.pa-gedongtataan.go.id/>.

Since January 2020, Gedong Tataan Religious Court has effectively developed a service to help public independently compiling legal document they need in court. The service officially named "Court Forms", a website-based service. It's available online at <https://www.pa-gedongtataan.go.id/>

Layanan ini dapat diakses secara bebas dan mudah oleh setiap calon pencari keadilan yang akan beperkara di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Tanpa perlu datang langsung ke kantor Pengadilan, para pihak dapat dengan mudah melihat dan mengunduh formulir-formulir yang disediakan. Formulir ini menjadi panduan bagi para pihak untuk dapat menyusun dokumen hukum yang diperlukannya secara mandiri.

Every single people who potentially filing a lawsuit or petition on Gedong Tataan Religious Court could easily access this service. Without having himself at court building, they could see and download available forms they need. All of these forms allow them to compile their legal document independently.



Fitur Utama :

Layanan "formulir berperkara" berisi formulir dokumen hukum. Formulir tersebut terdiri atas formulir

1. Gugatan Cerai;
2. Permohonan Pengesahan Nikah;
3. Permohonan Dispensasi Kawin
4. Permohonan Penetapan Ahli Waris;
5. Jawaban;
6. Replik;
7. Duplik;

Main feature :

Court forms provide various legal document forms, as follow:

1. Divorce lawsuit;
2. Request for marriage ratification;
3. Request for marriage dispensation;
4. Request for inheritance decree;
5. Form of respond;
6. Form of reply;
7. Form of re-reply.

Seluruh formulir tersebut dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Selanjutnya, mengikuti arahan dalam formulir dimaksud, masyarakat dapat melakukan pengisian dalil-dalil gugatan/permohonan sesuai dengan kronologi fakta yang mereka ketahui dan akan dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan perkara.

Public could download all of these forms, and it's free. Hereinafter, they should follow instructions provided on every form then filing propositions or state of facts chronologically as the basis of their lawsuit or request/petition.

Ke depan, layanan ini akan terus dikembangkan dengan menyediakan lebih banyak ragam formulir dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara. Harapannya, publik dapat merasakan manfaat lebih banyak dari layanan ini serta menciptakan citra Pengadilan yang melayani dan transparan.

Furthermore, this service would be developed continuously by providing more legal document form. Hence, public could earn more benefits of this service and then creating court image as the serving and transparent court.

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Agama Gedong Tataan
Jalan Cokro Suwarno No 05 Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Prov. Lampung
Telp (0721) 5620346, Email : pagedongtataan@gmail.com

carl

Beranda Halaman Utama Profil Sakber Layanan Publik Informasi/Pengaduan Layanan Hukum Prosesur-berperkara Transparansi Keterbukaan Publik Peraturan & Kebijakan Undang-Undang & Surat Edaran Bantuan Bantuan Hukum Kami

SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Situs resmi ini merupakan wadah diseminasi informasi secara daring (online) terkait dengan kebijakan institusi, informasi keperkaraan, dan informasi penting lain.

selengkapnya...

Home

FORMULIR BEPERKARA
Berisi formulir para pihak berperkara berupa formulir gugatan/permohonan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan sebagai acuan dalam menyusun dokumen berperkara.

INFORMASI PERKARA
Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN
Publikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

BIAYA PERKARA
Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

E-COURT
Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online.



Kotabumi Religious Court Successfully Execute Child Parenting

Divorce has not only affected spouses, children could also get affected. ABY, a 6 years old kid, forced to see his parents divorced and affected, then. ABY then handed over by court officer to his mother as the holder of parenting rights.

Registrar of Kotabumi Religious Court, Hj. Soleha, S.Ag., M.H. accompanied by the Bailiff, Rusli Burhan, S.H. and Chief Policeman and internal securities explained that child execution is the follow up toward court decision about child parenting. Due to the defendant didn't voluntarily carry out it, the plaintiff then files a request to execute the court decision.

The execution carried out on Wednesday, March 18 of 2020 at 10.00 a.m. - 1.40 p.m. The plaintiff and the defendant joined it. After giving persuasive treatment, kid who is in the defendant possession then handed over by himself to the plaintiff. /ENG

PENGADILAN AGAMA KOTABUMI SUKSES MELAKSANAKAN EKSEKUSI ANAK

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri saja, anak juga akan merasakan dampaknya. ABY yang masih berusia 6 tahun, harus merasakan akibat dari perceraian dari kedua orangtuanya RI (istri) dengan ME (suami), warga Desa Cabang Abung Raya, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. ABY harus dieksekusi oleh PA Kotabumi dari ME yang merupakan ayah kandungnya untuk diserahkan pada ibu kandungnya RI.

Panitera PA Kotabumi, Hj. Soleha, S.Ag.,M.H. didampingi Jurusita Bpk. Rusli Burhan, S.H dan Kapolsek beserta para anggota pengamanan internal PA Kotabumi menjelaskan bahwa eksekusi anak merupakan pelaksanaan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena pihak Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan Putusan Majelis Hakim secara sukarela, Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Ketua PA Kotabumi.

Eksekusi dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2020 Pukul 10.00 s/d 13.40 WIB. Hadir dalam kesempatan tersebut Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi beserta anak yang ada dalam kekuasaannya., Berkat bantuan kepala Desa Abung Selatan, Kepolisian, Kakek dan Nenek anak tersebut, akhirnya pihak Termohon Eksekusi bersedia menyerahkan anak yang ada dalam kekuasaannya kepada Pemohon Eksekusi secara sukarela. /IDN



Sidang Keliling PA Kotabumi

Sidang keliling yang digelar di kantor kecamatan bukit kemuning dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2020, dan dipantau langsung oleh Ketua PA Kotabumi. H. Zumrowi, S.Ag., M.H. Dalam sambutannya, Ketua PA Kotabumi menjelaskan bahwa, "perkara ini sudah terdaftar jauh hari sebelumnya, maka wajib bagi pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika ditunda terlalu lama bisa menyalahi aturan dan tugas pelayanan.

"Pada bulan Juni ini Pemerintah telah menetapkan New Normal dan daerah yang menjadi objek pelaksanaan sidang keliling tidak termasuk zona merah atau kuning, artinya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan harus menjaga produktivitas kita, agar dalam situasi seperti ini tetap produktif namun aman dari COVID-19, sehingga diperlukan tatanan yang baru. kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan", tegas Pak Ketua.

Setelah Selesai pelaksanaan sidang keliling, semua pakaian dan peralatan sidang disterilkan dengan disemprotkan cairan desinfektan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. / IDN

Kotabumi Religious Court Carried Out Circuit Court

On June 4 of 2020, Kotabumi Religious Court carried out circuit court in Bukit Kemuning Sub-District office. Chief Judge, H. Zumrowi, S.Ag., M.H., stated, "every case heard in this circuit court has been registered couple time ago so we should dispose it all sooner and this is the perfect time to execute".

"Earlier this June, our government proclaimed new normal. Then, circuit court could only carry out on outside both the red and yellow zone. Hence, we should carefully determine where circuit court be carried out while keep implementing Covid-19 protocol. New normal drive us to habiting something new after months of Covid-19 outbreak yet keeping to wash hand routinely, using face mask while being outside our house, keeping social distance, and avoiding crowd", He added. /ENG

At the end of circuit court, wardrobes and trial apparatus sterilized by spraying disinfectant.





Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Pengadilan Agama Kruai

Rabu (22 April 2020), bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Kruai, Ketua Pengadilan Agama Kruai Nurba'eti, S. Ag.M.H melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 5 orang Hakim Pengadilan Agama Kruai atas nama Arif Fortunately, S.Sy, H. Sahram.S.H, Yoga Maulana Wiharja, Lc, Jusran Ipani, S.H.I., M. Beni Kurniawan, S.Sy. berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 980/DjA/KP.04.6/SK/3/2020 tanggal 17 Maret 2020, Tentang Pengangkatan dan Penempatan Hakim Mahkamah Syar'iyah/ Pengadilan Agama di Lingkungan Peradilan Agama.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Hymne Mahkamah Agung, dilanjutkan dengan acara pengambilan sumpah dan pelantikan, serta penandatanganan Fakta Integritas Hakim Pengadilan Agama Kruai. Kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dengan memperhatikan dan protokol Covid-19 yang dilaksanakan penyemprotan Disenvektan dan sterilisasi ruangan sebelum acara di mulai, dan di lanjutkan dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. /IDN

Inauguration Judge of Kruai Religious Court

On Wednesday, April 22 of 2020, took place in main courtroom, Chief Judge of Kruai Religious Court took oath and inaugurated 5 new Associate Judges: Arif Fortunately, S.Sy, H. Sahram.S.H, Yoga Maulana Wiharja, Lc, Jusran Ipani, S.H.I., M. Beni Kurniawan, S.Sy. The oath taking and inauguration carried out based on Decree of Director General of Religious Court Agency 980/DjA/KP.04.6/SK/3/2020 date of March 17 of 2020 on Appointment and Placement Judges of Mahkamah Syar'iyah/ Religious Court.

Ceremony began with singing Indonesia Raya and Supreme Court hymn. It then followed by taking oath and inauguration for 5 new Associate Judges. Soon after that, they sign integrity pact. The event carried out by implementing Covid-19 protocol such disinfectant spraying and sterilizing room before starting ceremony. During ceremony, they always keeping social distance. /ENG



New Normal, Pelayanan Pengadilan Agama Krui di buka kembali dengan Menjalankan Protokoler Kesehatan Covid-19

Ketua Pengadilan Agama krui melaksanakan Rapat Koordinasi pada tanggal 28 mei 2020, yang diikuti seluruh pegawai dan PPNPN PA Krui dengan agenda menindaklanjuti persiapan New Normal Pelayanan di PA Krui.

Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah petugas pelayanan yang menjadi garda terdepan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Protoko kesehatan harus ditaati, seperti pemusatan akses masuk dan keluar area kantor pada satu pintu, pengecekan suhu tubuh dengan Thermogun, diwajibkan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan sarung tangan pelastik, menggunakan masker, dan phisical distancing. Dengan menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran covid-19 ini, diharapkan dapat meminimalisir pernyebaran virus corona di lingkungan PA Krui. Dan bagi seluruh pegawai dan PPNPN PA Krui diwajibkan menggunakan masker, face shiled dan APD Lengkap.

Pada Hari Selasa Tanggal 02 Juni 2020 Pengadilan Agama Krui telah membuka kembali Pendaftaran perkara secara normal, yang semula semua pendaftaran perkara itu hanya dibatasi secara Daring (Online) selama 2 (dua) bulan akibat Pandemic Covid-19 yang tengah melanda Negeri ini termasuk Kabupaten Lampung Barat. /IDN

New Normal, Krui Religious Court Keep Implementing Covid-19 Protocol

Chief Judge of Krui Religious Court led coordination meeting on May 28 of 2020. It attended by all of Judges and court officers. The main topic of it was following up new normal preparation for public services.

One issue that highlighted this meeting was how front officers give service directly to public. They should keep implementing health protocol during in the court area such promoting one gate access, checking body temperature with Thermogun, washing hand with soap, using glove, face mask, and physical distancing. By implementing health protocol, we could minimize Covid-19 spread around court area. For all of officers, they should be using face mask, and face shield.

Soon after new normal proclaimed, on June 2 of 2020, Krui Religious Court effectively re-open manual case registration and since then receiving filing lawsuit both manually and electronically. /ENG



Ketua Pengadilan Agama Mesuji Hadiri Acara Kunjungan Kerja Komandan Korem 043/ Garuda Hitam

Bertempat di Rumah Dinas Bupati Mesuji Kecamatan Simpang Pematang, Jumat bertepatan tanggal 15 Mei 2020 Ketua Pengadilan Agama Mesuji menghadiri Buka Bersama sekaligus Kunjungan Kerja Komandan Korem 043/ Garuda Hitam dalam rangka Monitoring Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Mesuji.

Turut Hadir juga dalam Bupati Mesuji Bapak H. Saply TH dan Asisten Bidang Administrasi Umum Nawawi Matni. Acara ini berjalan dengan lancar dan terbilang sukses. Semoga dengan kunjungan ini dapat mempererat hubungan antar pemerintahan Kabupaten Mesuji sehingga Pemerintah Mesuji dapat tanggap dalam menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Mesuji. /IDN

Chief Judge of Mesuji Religious Court Attended Working-Visit of Commander of 043 Military Rayon Command

On May 15 of 2020, took place in Mesuji regent official residence, Chief Judge of Mesuji Religious Court joined breakfasting together and working-visit of Commander of the 043 Military Rayon Command regarded to monitor progression of Covid-19 treatment.

In this event, Mesuji Regent, H. Saply TH, and Assistant of General Administration, Nawawi Matni also joined. It has successfully carried out and expecting to promote effectiveness of Covid-19 protocol. /ENG



Sosialisasi Zona Integritas (ZI) di PA Mesuji

Berempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Mesuji, pada tanggal 27 Mei 2020 berlangsung Rapat Sosialisasi Zona Integritas di PA Mesuji, dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ketua PA Mesuji, Djulia Herjanara, S.Ag.,S.H.,M.H. menyampaikan Bahwa semua jajaran PA Mesuji harus berkomitmen untuk mensosialisasikan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Mesuji. Selanjutnya Wakil Ketua PA Mesuji, Padmilah, S.H.I.,M.H. selaku ketua pembangunan Zona Integritas memberikan pengarahan tentang tahapan-tahapan dalam membangun Zona Integritas, sekaligus membagi tugas kepada seluruh hakim dan pegawai.

Dengan Terbentuknya WBK dan WBBM (Wilayah Bebas Korupsi) (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Menjadikan Pengadilan Agama Mesuji sebagai Pedoman Bagi Seluruh Pegawai Dan ASN./ IDN

Socialization of Integrity Zone in Mesuji Religious Court

Taking place in the main courtroom of the Mesuji Religious Court, on May 27 of 2020, the Integrity Zone toward a Corruption Free Area (WBK) and the Clean and Serving Bureaucracy Area (WBBM) Socialization Meeting carried out.

Chief Judge stated that all of court officers should be committing to socialize Integrity Zone in all area of the court. Furthermore, Vice Chief Judge, Padmilah, S.H.I., M.H., as Leader of Integrity Zone Development Committee explained stages in Integrity Zone Development and also dividing task for every work group.

WBK and WBBM are intended to be a guidance for all of Judges and court officers. / ENG

Pengadilan Agama Pringsewu

Pringsewu Religious Court



Pengadilan Agama Pringsewu Pindah Kantor

Pengadilan Agama (PA) Pringsewu telah beroperasi sejak tanggal 29 Oktober 2018 dengan menempati gedung Pengadilan Agama yang berlokasi di Jalan Pelita I Kelurahan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu. Gedung PA Pringsewu pada awalnya masih memakai gedung yang dipinjamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

Seiring waktu, semakin bertambahnya jumlah pegawai PA Pringsewu, maka gedung tersebut sudah tidak memadai lagi untuk ditempati pegawai sejumlah 34 orang. Oleh karena itu, saat ini Kantor PA Pringsewu telah berpindah kantor di Jalan Kesehatan No. 1474 Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kantor baru ini lebih representatif baik bagi Aparatur PA Pringsewu maupun bagi masyarakat pencari keadilan. /IDN

Pringsewu Religious Court Moves Its Courthouse

Pringsewu Religious Court was officially established since October 29 of 2018 and located in Pelita I Street, East Pringsewu Sub-District, Pringsewu Regency. The first courthouse was lent by local government of Pringsewu Regency.

As time goes by, number of officers raised up and it caused old courthouse felt so narrow and so overwhelmed for 34 officers in total. Consequently, Pringsewu Religious Court moves its courthouse to 1474 Kesehatan Street, South Pringsewu, Pringsewu Sub-District, Pringsewu Regency. It's far more representative than the old one as courthouse and promoting enjoyable situation for both officers and justice seekers. /ENG

Pada tanggal 26 s/d 28 Mei 2020, Seluruh Aparatur PA Pringsewu dengan antusias menata dan berbenah untuk mempersiapkan kelengkapan di gedung baru kantor PA Pringsewu. Kegiatan tersebutdi antaranya adalah bersih-bersih dan penataan ruangan.

Pada tanggal 29 Mei 2020 Seluruh aparaturnya PA Pringsewu melaksanakan tasyakuran karena akan menempati gedung kantor baru. Pada acara tersebut Ketua PA Pringsewu, Ridwan Harahap, S.H., M.H. dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh Aparatur PA Pringsewu atas kepindahan gedung baru.

Dan akhirnya, pada tanggal 2 Juni 2020 PA Pringsewu telah mulai beroperasi di gedung baru, baik dalam tugas memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan, maupun dalam kegiatan persidangan. Semoga PA Pringsewu selalu memberikan pelayanan yang prima dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya bagi warga Kabupaten Pringsewu. /IDN



On May 26 – 28 of 2020, all of court officers enthusiastically rearrange and set their room and apparatus in their new courthouse. They first clean up every room and deciding the division of each room.

May 29 of 2020 was the monumental moment. The day was the historical timeline to celebrate due to sitting new courthouse. On that day, Pringsewu Religious Court celebrated courthouse movement. In his opening speech, Chief Judge, Ridwan Harahap, S.H., M.H. greeted all of officers for the brand-new courthouse.

Following this, on June 2 of 2020, Pringsewu Religious Court officially operates in new courthouse which is far more representative to present excellent services for all of justice seekers. /ENG



Inauguration Judge of Pringsewu Religious Court

PA SUKADANA TETAP AKTIF BERKEGIATAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Pengadilan Agama (PA) Sukadana tetap menyelenggarakan pelayanan dan persidangan sesuai dengan intruksi protokol pencegahan Virus Covid-19, yaitu dengan mewajibkan pada pihak pencari keadilan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta membatasi pihak untuk masuk ke ruang pelayanan dan ruang sidang.

Adanya pembatasan pelayanan serta persidangan ini dikarenakan untuk mencegah berkumpul dan interaksi para pihak pencari keadilan baik itu di ruang tunggu pelayanan, ruang tunggu sidang serta ruang sidang dan secara umum di lingkungan perkantoran Pengadilan Agama Sukadana.

Tak terkecuali Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Sukadana, selama beberapa bulan kebelakang juga diberlakukan pembatasan, hal ini bertujuan juga untuk membatasi interaksi antar pegawai, sehingga kebijakan pembagian tugas di rumah (Work From Home) dan kerja di kantor (Work From Office) diterapkan, namun baik Hakim dan Pegawai tetap aktif dalam pelaksanaan tugas dan kerja.

Pembatasan pelayanan maupun penyelesaian sidang perkara akan tetap mengikuti protokol pencegahan penyebaran covid-19. Hal itu, demi menjaga keselamatan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sukadana serta masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Sukadana.

Dalam penerapan pelayanan baik penerimaan perkara, pelayanan informasi maupun pengambilan produk pengadilan, Pengadilan Agama Sukadana menerapkan kebijakan untuk para pencari keadilan mendaftarkan perkara secara elektronik atau melalui e-Court, dan pelaksanaan persidangan secara elektronik atau e-Litigasi, terutama bagi para Advokat. /IDN



Sukadana Religious Court Remain Actively Serves Public Through Covid-19 Outbreak

Sukadana Religious Court remain serves public and conducting trials by keep implementing Covid-19 protocol. Every visitor should be washing their hands, using face mask, keep their distance, and restricting the number of visitors waiting in main lobby and courtroom.

Every visitor around the courthouse should avoid crowding and direct interaction in main lobby, courtroom waiting area, and generally around the courthouse. Covid-19 protocol has no exception, beside visitors, every Judge and court officer should minimize their direct contact and keeping their self-clinical during in the courthouse. Furthermore, as the implementation of Covid-19 protocol, court implemented Work From Office and Work From Home policy to keep every officers stay in their safety distance yet giving their best performance.

The service restrictions and trials would continue using The Covid-19 protocol. That is, for the sake of protecting the safety of all officers and justice seekers in the Sukadana Religious Courts. In the application of services both in court registration, information services, and court documents services, the Sukadana Religious Court applies several policies for justice seekers such electronic case registration, applying e-Court, and the implementation of electronic trials or e-Litigation both for advocates and non-advocate parties. /ENG

Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mohon kiranya dapat mengisi KUESIONER ini yang dimaksudkan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat Masyarakat tentang kualitas pelayanan publik sekaligus bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Agama SUKADANA.
Terima kasih atas partisipasinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Hormat Kami,
Tim Survey APM PA Sukadana

* Required

Umur *

< 20 Tahun

20 - 29 Tahun

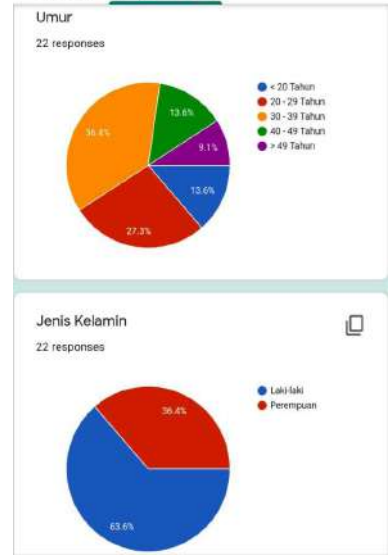
30 - 39 Tahun

40 - 49 Tahun

Survey Virtual Pelayanan Publik & Persepsi Korupsi

Survey Pelayanan Publik dan Persepsi

Questions Responses 22



Survey Virtual Pelayanan Publik & Persepsi Korupsi Pada masa pandemi covid-19, untuk menghindari kontak secara langsung dengan Masyarakat sebagai responden, Tim Survey APM telah melakukan inovasi baru dalam melakukan Survey Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi dengan membuat Survey Virtual (online) yang dikirim melalui Nomor WhatsApp pihak pencari keadilan dan memasang di laman Touchscreen yang tersedia di PTSP.

"Survey ini dilakukan dalam rangka Surveilance APM tahun 2020 yang akan dilakukan peniliannya sekitar bulan Nopember 2020 dengan harapan pada Surveilance nanti akan mendapat nilai yang lebih baik yaitu Akreditasi A Excellence", demikian ungkap Assessor PA Sukadana yang merupakan inisiator Survey Virtual Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Jumlah populasi dalam survey virtual ini sebanyak 150 responden yang merupakan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 24 Kecamatan yang diambil secara random sebagai sample. Sejak dilaunching Selasa, 2/6/2020 lalu sampai saat ini sudah ada 26 responden yang telah mengisi Survey Virtual tersebut, sehingga ditargetkan pada akhir Juni 2020 jumlah populasi responden dapat terpenuhi. /IDN

Virtual Surveys on Public Services and Corruption Perception Index

Sukadana Religious Court conducts Virtual Surveys on Public Services and Corruption Perception Index through Covid-19 outbreak. The survey conducted virtually to prevent direct contact with public as main respondents. The Quality Assurance Accreditation (APM) Team promoted innovation in doing so by sending questionnaires through public's WhatsApp number and displaying it in touchscreen media around frontline desk.

"This survey intendedly carried out as part of the upcoming 2020 APM surveillance. We all expect that in the upcoming surveillance, Sukadana Religious Court would earn better both score and rank (A excellent predicate)", said Sukadana lead Assessor and the initiator for virtual surveys, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Total number of respondents was 150 and all of them are citizens in East Lampung Regency. Every respondent picked up randomly and represents 24 Sub-Districts. Since its first launch, there were 26 respondent who completely filled the survey and we are targeting the last June of 2020 would be accomplished. /ENG

Pengadilan Agama Tulang Bawang

Tulang Bawang Religious Court



Virtual Meeting APM dan ZI di PA Tulang Bawang

Tulang Bawang Religious Court Joined APM and ZI Virtual Meeting

Jum'at, 15 Mei 2020, PTA Bandar Lampung kembali mengadakan Virtual Meeting bersama Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bandar Lampung. Sebagaimana yang tertuang dalam surat undangan PTA Bandar Lampung Nomor : W8-A/824/HM.02.5/5/2020 tanggal 12 Mei 2020. Materi yang dibahas kali ini yaitu tentang APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) dan ZI (Zona Integritas).

On May 15 of 2020, Bandar Lampung Religious High Court held virtual meeting along with all of religious court around Lampung region. This meeting was the follow up of invitation letter of Bandar Lampung Religious High Court number W8-A/824/HM.02.5/5/2020 date of May 12 of 2020. The main topic discussed was Quality Assurance Accreditation (APM) and Integrity Zone (ZI).

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut memanfaatkan aplikasi Zoom. Acara dibuka oleh Ketua PTA Bandar Lampung Dr. H. nurdin Juddah, S.H., M.H. dan selanjutnya diteruskan oleh Ibu Wakil Ketua Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H. dengan memaparkan materi tentang APM dan ZI.

Meeting began at 9.00 a.m and using Zoom app. Chief Judge of Bandar Lampung Religious High Court, Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H opened meeting and then speech about APM and ZI by Vice Chief Judge, Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pembangunan APM dan ZI ini yaitu melakukan perubahan mindset atau pola pikir. Yaitu Keyakinan, nilai-nilai, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat kita terhadap diri kita sendiri serta orang lain dalam kehidupan. Mindset atau pola pikir ini menggerakkan perilaku kita. Perubahan yang dimaksud adalah berubah dari pola pikir yang negatif ke pola pikir yang lebih positif. Berubah dari pola pikir pekerja menjadi pencipta pekerjaan, dari statis menjadi dinamis, dari pecundang menjadi pemenang. /IDN

There is main goal of the development of APM and ZI, it is changing our mindset as court officers. We should reset our beliefs, values, criteria, expectation, attitude, habits, decisions, and our perception about ourselves and others. This mindset drives our behavior. The alteration we meant is shifting negative mindset to positive mindset. We should shift from worker mentality to work-creator mentality, from static into dynamic person, and from the loser into the winner. /ENG



Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Dua Hakim Baru

Selasa, 21 April 2020 Pengadilan Agama (PA) Tulang Bawang melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan Dua Hakim Baru yaitu Nur Halimah, S.H.I. dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy. Acara pelantikan dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Tulang Bawang tanpa diikuti banyak pegawai maupun undangan, sesuai protokoler physical distancing, hanya Pegawai yang bertugas yang berada di Ruang Sidang

PA Tulang Bawang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Surakarta melaksanakan Pengambilan Sumpah Jabatan & Pelantikan secara online via aplikasi skype untuk salah satu Hakim yang tedampak PSBB. Hakim yang dilantik di Surakarta bisa mengikuti semua prosesi sampai selesai secara teleconference. Pelantikan dan Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang H. Soleh, Lc., M.A. dan di Surakarta Hakim Maulina Nuril Izzati, S.Sy. mengikuti sembari disumpah oleh Rohaniwan Pengadilan Agama Surakarta.

Usai acara, Ketua PA Tulang Bawang menyampaikan ucapan terima kasih kepada PA Surakarta yang telah memfasilitasi pelanyikam Hakim PA Tulang Bawang tersebut. /IDN

Oath-Taking and Inauguration Ceremony for 2 New Associate Judges

On Tuesday, April 21 of 2020, Tulang Bawang Religious Court held oath-taking and inauguration for 2 ne Associate Judges, Nur Halimah, S.H.I. and Maulina Nuril Izzati, S.Sy. It took place in main courtroom of Tulang Bawang Religious Court without having many officers and invited guests. It conducted by fully implementing Covid-19 protocol which only person in charge entering the room.

Tulang Bawang Religious Court cooperates with Surakarta Religious Court in carrying out virtual oath-taking and inauguration ceremony. They use Skype app for one of the Judge, Maulina Nuril Izzati, S.Sy, due to PSBB (Massive Scale of Social Distancing) policy. The Judge who inaugurated virtually in Surakarta complete all of ceremony stages. It led directly by Chief Judge, H. Soleh, Lc. M.A.

After taking oath for both Associate Judges, Chief Judge thanking all of stakeholders to make it possible. /ENG

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Tulang Bawang Tengah Religious Court



Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim dan Pelantikan Venti Ambarwati, S.H.I dan Laili Herawati, S.Sy. Sukses dilakukan Secara Daring

Pulung Kencana, Rabu 29 April 2020. April Yadi, S.Ag, M.H, selaku Ketua PA Tulang Bawang Tengah mengambil sumpah jabatan dan melantik 2 orang Calon Hakim menjadi Hakim Pratama pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah. Adapun Hakim tersebut adalah Venti Ambarwati, S.H.I dan Laili Herawati, S.Sy.

Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dilakukan secara daring sesuai Surat Edaran Nomor 10/SE/IV/2020 Tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pns Atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/ Teleconference Pada Masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona. Acara ini diadakan berkat kerja sama Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Pengadilan Agama Banjarnegara yang saling terhubung lewat teleconference. /IDN

The Virtual Oath-Taking and Inauguration of Judge Successfully Carried Out

Chief Judge of Tulang Bawang Tengah Religious Court, April Yadi, S.Ag., M.H., took oath and inaugurated 2 new Associate Judges. They are Venti Ambarwati, S.H.I and Laili Herawati, S.Sy.

The ceremony virtually carried out regarding Circular Letter Number 10/SE/IV/2020 on Inauguration and Oath-Taking Ceremony for Civil Servant by Teleconference Due to Corona Outbreak. This is could be conducted successfully, thanks to the cooperation between Tulang Bawang Tengah Religious Court and Banjarnegara Religious Court. All of ceremony stages carried out virtually by using teleconference media. /ENG

Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP :

PA Tulang Bawang Tengah 5 Bulan Berturut-turut Peringkat I Se - Wilayah Lampung

Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP dan Publikasi Putusan PA Tulang Bawang Tengah, senantiasa berada dalam posisi 10 besar nasional untuk kategori V sejak rilis Awal Januari sampai tanggal 29 Mei 2020. Sementara untuk tingkat PA se Lampung, Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP, PA Tulang Bawang Tengah sejak Awal Januari sampai rilis terakhir dari PTA Bandar Lampung pada tanggal 3 Juni 2020 masih menduduki posisi ranking 1.

Ketua PA Tulang Bawang Tengah, April Yadi, S.Ag., M.H., Wakil Ketua Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I., dan Panitera Miswardi, S.H sebagai pimpinan Komando Tim SIPP mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Tim SIPP. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Tim SIPP PA Tulang Bawang Tengah sehingga SIPP PA Tulang Bawang Tengah mampu bersaing dengan PA lainnya, oleh karenanya kepada tim SIPP dan admin, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga, atas kerja sama dan kepeduliannya sehingga nilai SIPP selalu meningkat," ucap ketua.

Proses yang sangat signifikan ini tidak lepas dari gerak cepat dan cerdasnya Wakil Ketua Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I yang selalu memotivasi tim SIPP sehingga hasil yang baik ini bisa tercapai. "SIPP PA Tulang Bawang Tengah naik secara signifikan, itu bisa dicapai dengan kerja keras dan kerja cerdas, semoga pada rapor penanganan perkara berdasarkan SIPP pada periode berikutnya naik lagi dan paling tidak bisa bertahan." pungkask Ketua. /IDN

SIPP-Based Case Clearance Performance Index:

Tulang Bawang Tengah Religious Court achieves The 1st Rank 5 Months Consecutively Around Lampung Region

SIPP-Based Case Clearance Performance and Court Decision Publication Indexes has shown that since January of 2020 till May 29 of 2020, Tulang Bawang Tengah has always sat in national big 10 for the V category. Meanwhile, in Lampung Region category, for the last 5 months, Tulang Bawang Tengah Religious Court convincingly ranked first.

Chief Judge, April Yadi, S.Ag., M.H; Vice Chief Judge, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I; and Registrar, Miswardi, S.H as the trio of SIPP Team Leader thanking all of team member. "I, personally, deliver bunch of thanks to all of team member for commanding strategic and speedy actions and by doing so, our achievement competitively compared with other court. Hereby, I really appreciate that", said Chief Judge.

Smart action and motivation by Vice Chief Judge has significantly driven this achievement. "Surely someday, our SIPP index would increase and it all depends on our harder and smarter work. We expect, for the upcoming release, our index would crack up and maintain it", Chief Judge ended his speech. /ENG

Rapor Kinerja SIPP

NO	KATEGORI	SATKER	NILAI			RANKING NASIONAL			RANKING LAMPUNG
			29/05/2020	05/06/2020	NAIK/TURUN	29/05/2020	05/06/2020	NAIK/TURUN	
1	III (TIGA)	GUNUNG SUGIH	96,62	96,65	0,03	18	17	1	6
	1.001 - 2.500								
2	IV (EMPAT)	METRO	99,07	99,09	0,02	4	4	0	2
3	251 - 1000	B. UMPU	98,38	98,32	(0,06)	16	20	-4	3
4		T. KARANG	96,02	96,88	0,86	59	36	23	4
5		TANGGAMUS	96,80	96,81	0,01	40	39	1	5
		KRUI	95,10	95,06	(0,04)	106	76	30	7
6		PRINGSEWU	94,50	94,50	(0,00)	95	97	-2	8
7		KOTABUMI	94,37	94,36	(0,01)	103	105	-2	9
8		SUKADANA	94,01	93,78	(0,23)	111	119	-8	10
9		KALIANDA	92,49	92,63	0,14	134	140	-6	12
10		T. BAWANG	92,04	92,44	0,40	139	142	-3	13
11	V (LIMA)	TUBATENG	99,33	99,34	0,01	7	8	-1	1
13	1-250	MESUJI	92,55	92,36	(0,19)	138	136	2	14
14		G.TATAAN	93,71	93,54	(0,17)	130	126	4	11

CAKRAWALA

Horizon

HUKUM ACARA E- LITIGASI

THE PROCEDURAL LAW OF E-LITIGATION

Oleh/by:

Muhammad Faudzan, S.Sy.

Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan
(Judge of Gedong Tataan Religious Court)

“Revolusi industri 4.0 memiliki karakteristik yakni seluruh entitas dapat berkomunikasi secara real time dengan dasar teknologi informasi, otomisasi dan berkurangnya jumlah tenaga kerja manusia dan digitalisasi data dan informasi.”

Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 (empat) atau yang dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. Istilah tersebut pertama kali muncul di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital. Industri ini merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi, dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya.

The world is currently facing a 4 (four) industrial change, also known as the industrial revolution 4.0. The term first appeared in Germany in 2011 which was marked by a digital revolution. This industry is a digitally connected industrial process that includes various types of technology, where information and communication technology is fully utilized.

Revolusi industri 4.0 memiliki karakteristik yakni seluruh entitas dapat berkomunikasi secara real time dengan dasar teknologi informasi, otomisasi dan

berkurangnya jumlah tenaga kerja manusia dan digitalisasi data dan informasi. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang teknologi saja, namun juga pada bidang lainnya seperti ekonomi, sosial, politik dan hukum dan membawa pada transisi revolusi secara fundamental yang akan mengubah cara hidup, berpikir, bekerja dan cara dalam berhubungan satu dengan lainnya atau relasi organisasi.

The industrial revolution 4.0 has the characteristics that all entities can communicate in real-time on the basis of information technology, automation, and the reduction in the number of human labor and digitalization of data and information.

This era will disrupt various human activities in various fields, not only in technology but also in other fields such as economics, social, politics and law and lead to a revolutionary transition that will fundamentally change the way of life, thinking, working and relation ways to communicate or organizational relations.

Revolusi industri ini menjadikannya sebagai salah satu tantangan terhadap pengadilan secara universal. Menghadapi hal tersebut, pengadilan juga harus mengharuskan adanya digitalisasi sistem dalam pelayanan di bidang administratif perkara dan persidangan di pengadilan. Digitalisasi sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun suatu peradilan yang modern berbasis teknologi informasi. Konsep peradilan modern sebagai bagian dari lembaga yang berorientasi kepada pelayanan publik dituntut agar berubah dengan mengikuti percepatan zaman secara cepat, efektif dan efisien dengan didukung perangkat dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengimplementasikan kecanggihan teknologi.

This industrial revolution made it one of the challenges to the court universally. Deal with this, the court must also require the digitalization of the system in the service in the field of administrative matters and trials in the court. Digitalization of the system is an inseparable part of efforts to build a modern judiciary based on information technology. The concept of modern justice as part of institutions oriented to public service is demanded to change by following the acceleration of the times quickly, effectively, and efficiently with the support of devices and human resources who have the ability to implement sophisticated technology.

Terjadinya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan di masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan beberapa peraturan Mahkamah Agung dan berbagai petunjuk teknis lainnya yang mengatur praktik administrasi dan beracara dalam perkara perdata secara elektronik.

The progress of technology development, especially in the field of informatics and the desire of the community in accelerating the settlement of cases has prompted the Supreme Court to issue a number of Supreme Court regulations and various other technical guidelines governing administrative practices and proceedings in civil cases electronically.

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung pertama kalinya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pada tanggal 6 Juni 2019, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang diikuti dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

In 2018, the Supreme Court first issued Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning Case Administration in the Electronic Court. On June 6, 2019, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Case and Court Administration followed by Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 129 / KMA / SK / XII / 2019 concerning Technical Instructions for Case and Trial Administration in Courts Electronically, as well as the Decree of the Chairperson of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 271 / KMA / SK / XII / 2019 dated 31 December 2019 concerning Technical Instructions for Case Administration and Trials at the Court of Appeals, Cassation, and Judicial Review Electronically.



Menerapkan sistem peradilan dengan e-Court dan e-Litigation sejalan dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menjadikan sebagai modernisasi manajemen perkara sebagai agenda pembaruan peradilan untuk mencapai visi badan peradilan Indonesia yang agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Implementing the justice system with e-Court and e-Litigation in line with the 2010-2035 Judicial Reform Blueprint that makes modernizing case management an agenda for justice reform to achieve the vision of the great Indonesian judiciary, ideally being realized as a modern judicial body with based on integrated information technology.

Penerapan sistem peradilan tersebut sangat membantu sekali bagi masyarakat pencari keadilan untuk memudahkan berurusan dengan pengadilan dan memberikan kelancaran dalam penyelesaian perkara sebagai wujud penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung memberi kontribusi bagi perbaikan peringkat indeks kemudahan berusaha di Indonesia dengan sasaran agar ada peningkatan investasi sehingga terjadi kepercayaan dunia investasi terhadap dua parameter yang berkaitan dengan badan beradilan di bidang kepailitan dan penegakan terhadap pelaksanaan kontrak.

The implementation of the justice system is very helpful for justice seekers to make it easier to deal with the court and provide smoothness in the settlement of cases as a form of applying the principle of simple, fast, and low cost. Innovations made by the Supreme Court contribute to the improvement of the ranking of business ease indexes in Indonesia with the goal of increasing investment so that there is world investment trust in the two parameters relating to the judiciary in the field of bankruptcy and enforcement of contract implementation.

Dory Reiling dalam bukunya yang berjudul *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform* mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) persoalan yang dikeluhkan dari lembaga peradilan yaitu keterlambatan (delay), keterjangkauan (access) dan integritas (integrity). Maka dari itu, melalui upaya persidangan secara elektronik diharapkan Mahkamah Agung dapat mampu menjawab persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara di pengadilan.

Dory Reiling in his book entitled Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform argues that there are 3 (three) issues complained of by the judiciary namely delay, access, and integrity. Therefore, through electronic trial efforts, it is hoped that the Supreme Court will be able to answer the problems that have been faced by the parties when litigating in court

Perma Nomor 1 Tahun 2019 serta SK KMA Nomor 129/KMA/SK/XII/2019 telah mengatur dan memberikan petunjuk beracara di Pengadilan secara elektronik tentang pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan perkara di persidangan sampai dengan upaya hukum. Berikut ini merupakan proses pemeriksaan perkara secara elektronik:

Supreme Court Regulation Number 1 Year 2019 and SK KMA Number 129 / KMA / SK / XII / 2019 have arranged and provided court instructions in court electronically

about case registration, payment of case fees, summoning of parties, and examining cases at trial until legal remedies. The following is the process of examining cases electronically:

1. Domisili/Domicile

Domisili elektronik para pihak berperkara adalah berdasarkan alamat surat elektronik yang dipilih pengguna terdaftar dan pengguna lain dalam menggunakan layanan administrasi perkara dan persidangan yang telah diverifikasi. Domisili elektronik akan berlaku apabila pengguna e-Court melakukan aktivasi email dan memberikan persetujuan email tersebut sebagai domisili elektronik.

The electronic domicile of the litigants is based on the electronic mail address chosen by the registered user and other users in using verified case and trial administration services. Electronic domicile will apply if the e-Court user activates the e-Court and approves the e-mail as an electronic domicile.

2. Subjek Hukum/Legal Subjects

Subjek hukum dalam e-Litigation dibagi dalam dua bentuk. Pertama, pengguna terdaftar yaitu advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Untuk dapat menjadi pengguna terdaftar, advokat harus melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan advokat dan berita acara sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi.

Legal subjects in e-Litigation are divided into two forms. First, registered users are advocates who qualify as users of court information systems with rights and obligations regulated by the Supreme Court. In order to become a registered user, an advocate must attach a resident identification card, advocate membership card, and official reports of oath issued by the High Court.

Kedua, pengguna lain yaitu subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban diatur oleh Mahkamah Agung yang meliputi jaksa pengacara negara, biro hukum pemerintah/TNI/Polri, Kejaksaan RI, direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh badan hukum dan kuasa insidental yang ditentukan undang-undang.

Second, other users, legal subjects besides lawyers who meet the requirements to use the court information system with rights and obligations regulated by the Supreme Court, which includes state attorneys, bureau of state / TNI / Police, the Indonesian State Attorney's Office, directors/management or employees appointed by legal entities and incidental powers determined by law.

3. Penerimaan dan Pencatatan Perkara/Case Receipt and Register

Pada ketentuan umum angka 2 SK KMA Nomor 129/KMA/SK/XII/2019 menerangkan bahwa aplikasi e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan, gugatan sederhana, bantahan permohonan, pembayaran biaya perkara, melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan, persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang terintegrasi dengan SIPP.

In general provisions number 2 SK KMA Number 129 / KMA / SK / XII / 2019 explain that the e-Court application is an application used to process lawsuits, simple lawsuits, rebuttal requests, payment of court fees, make court summons and notifications, hearings, decisions and electronic remedies and other case application services established by the Supreme Court integrated with SIPP (Case Tracking System).



e - Court
The Electronics Justice System

Cakrawala

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkara secara daring melalui aplikasi e-Court dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memilih pengadilan yang berwenang;
2. Mengunggah surat kuasa khusus;
3. Mendapatkan nomor pendaftaran online;
4. Menginput data pihak;
5. Mengunggah dokumen gugatan permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;
6. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM);
7. Pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.

Registered users register cases online through the e-Court application with the following stages:

1. *Choose an authorized court;*
2. *Upload a special power of attorney;*
3. *Get an online registration number;*
4. *Enter the party data;*
5. *Upload plea/suit documents and principal approval letters for proceedings electronically;*
6. *Get an estimate of the estimated down-payment (e-SKUM);*
7. *Registered users make payments electronically.*

Bagi pengguna lain setelah mendapatkan akun dapat mendaftarkan perkara melalui dari dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memilih pengadilan yang berwenang;
2. Mengunggah surat kuasa khusus;
3. Mendapatkan nomor pendaftaran online;
4. Menginput data pihak;
5. Mengunggah dokumen gugatan permohonan dan surat

persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik;

6. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM);
7. Pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.

For other users after getting an account can register the case through the following stages:

1. *Choose an authorized court;*
2. *Upload a special power of attorney;*
3. *Get an online registration number;*
4. *Entering party data;*
5. *Uploading claim suit documents and principal approval letters for proceedings electronically;*
6. *Get an estimate of the estimated down-payment (e-SKUM);*
7. *Registered users pay electronically*

4. Biaya Perkara/Court Fees

Aplikasi e-Court menyediakan penghitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM. Komponen biaya perkara terdiri dari biaya proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran;
2. PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat maupun Tergugat;
3. Alat tulis kantor;
4. Biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat;
5. Panggilan Tergugat x5 (mediasi x2 dan panggilan sidang x3) khusus untuk perkara cerai talak panggilan x6;
6. Meterai;
7. Redaksi.

The e-Court application provides automatic fee calculation and e-SKUM issuance. Court Fees consist of the processing fees as regulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2012 concerning the costs of the Case Settlement Process and its Management in the Supreme Court and the Judiciary Body below it, which are:

1. *Registration fee;*
2. *PNBP Power of Attorney and Call of Plaintiff or Defendant;*
3. *Office stationery;*
4. *Claims doubling costs for Defendants;*
5. *Defendant's Summons x5 (mediation x2 and subpoena x3) specifically for divorce from the husband call x6;*
6. *Stamp;*
7. *Redaction.*

Aplikasi e-Court menyediakan kode akun virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara dan PNBP pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain. Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan dapat bank sesuai saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

- Memperoleh taksiran panjar biaya perkara yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik;
- Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM);
- Menunggu konfirmasi otomatis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi e-Court;
- Setelah mendapatkan konfirmasi dari, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam SIPP.

The e-Court application provides a virtual account code that is used to pay the court fee in advance and PNBP for power of attorney

registration electronically, both by registered users and other users. Registered users and other users pay the court fee in accordance with e-SKUM to the court bank account according to the payment channel electronically with the following steps:

- *Obtain estimated cost of case fees accompanied by virtual account codes for electronic payment channels;*
- *Make payments according to the estimated cost of the court fee (e-SKUM);*
- *Wait for automatic confirmation from the system, check payments automatically or confirm payment manually by filling out the form provided by the e-Court application;*
- *After getting confirmation from registered users and other users, will get a case number after registering in SIPP. If you want to add an additional fee, registered users and other users can add additional case costs through the SIPP application. Furthermore, you will get an electronic notification for the remaining down-payment of the case fee after the SIPP financial journal is closed.*

Apabila akan menambah panjar biaya, pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat melakukan penambahan panjar biaya perkara melalui aplikasi SIPP. Selanjutnya akan mendapatkan notifikasi elektronik atas sisa panjar biaya perkara setelah jurnal keuangan SIPP ditutup.

In case of court fees addition, registered and other users can pay additional fees by using SIPP app. Hereinafter, they would immediately receive electronic notification of their payment after daily finance journal closed.



5. Proses Pendaftaran Perkara Secara Elektronik/*Electronic Case Registration Process*

Setiap pengadilan tingkat pertama wajib menyediakan meja e-Court yang merupakan bagian dari PTSP. Pada meja e-Court ditunjuk petugas khusus dengan surat keputusan Ketua Pengadilan untuk memberikan bantuan serta informasi tentang tata cara e-Court.

Proses pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan setelah pemberkasan lengkap melalui tahapan sebagai berikut:

1. Meja 1 melakukan login pada aplikasi SIPP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
2. Memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi SIPP.

Every court of the first instance must provide an e-Court table which is part of the PTSP. At the e-Court table, a special officer is appointed with the Decree of the Chief Justice to provide assistance and information about the e-Court procedures. The electronic case registration process is carried out after the filing is complete through the following stages:

1. *Table 1 logs in to the SIPP application based on the username and password provided by the administrator;*
2. *Select a case classification and assign a case number to the SIPP application.*

6. Pemanggilan Secara Elektronik/*Electronic Summons*

Electronic Summons

Pemanggilan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

An electronic summons is legal and proper, as long as they are sent to electronic domicile within the time limit specified by law.

Pemanggilan pertama untuk Penggugat/Kuasa dilaksanakan secara elektronik, sedangkan panggilan pertama Tergugat dilaksanakan secara manual. Pemanggilan terhadap Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik

dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti berdasarkan perintah majelis hakim ke domisili elektronik para pihak melalui aplikasi E-Court. Apabila pihak berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, maka panggilan dapat disampaikan dan ditembuskan kepada Pengadilan dimana tempat pihak tersebut berdomisili. Dalam hal pihak berdiam di luar negeri maka akan dipanggil menggunakan aplikasi rogatori online yang diakses melalui website kementerian luar negeri.

The first summons for the Plaintiff/ the Attorney is carried out electronically, while the first Call for the Defendant is carried out manually. Summon for the Plaintiff who registers electronically and the Defendant or other party who has stated his agreement to be summoned electronically is carried out by a substitute bailiff/bailiff based on a panel of judges' order to the electronic domicile of the parties through the E-Court application. If the party is domiciled outside the jurisdiction of the Court, then the summons can be submitted and sent to the Court where the party is domiciled. If the party is domiciled abroad, he/she will be summoned using an online rogatory application accessed through the website of the foreign ministry.

Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan login pada aplikasi E-Court sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci. Kemudian Jurusita mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik dan mengirim panggilan melalui Aplikasi E-Court ke domisili elektronik para pihak.

The Bailiff / Substitute Bailiff login to the E-Court application according to the username and password. Then the Bailiff confirmed the trial schedule before sending an electronic call and sending the summons via the E-Court Application to the electronic domicile of the parties



7. Mediasi/ Mediation

Dalam pemeriksaan perkara elektronik, proses mediasi tetap dilaksanakan dan dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Pelaksanaan mediasi dilakukan setelah Ketua Majelis Hakim meminta persetujuan persidangan elektronik kepada Tergugat. Pasal 3 ayat (3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa mediasi dapat dilaksanakan melalui komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam proses mediasi tersebut.

In the examination of electronic cases, the mediation process continues to be carried out and attended directly with or without the attorney. The mediation is carried out after the Chair of the Panel of Judges requests Defendant's electronic trial approval. Article 3 paragraph (3 and 4) of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 states that mediation can be carried out through remote audio-visual communication that allows all parties to see and hear each other directly and participate in the mediation process.

8. Persidangan Secara Elektronik/

Electronic Trials

a. Tahap Pemeriksaan/Examination Phase

Pada sidang hari pertama, jika Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, majelis hakim dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam persidangan elektronik. Majelis hakim meminta agar Penggugat baik pengguna terdaftar atau pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.

On the first day of the trial, if the Plaintiff and Defendant are present at the trial, the panel of judges could provide an explanation of the rights and obligations of the parties in the electronic trial. The panel of judges requested that the Plaintiff either registered users or other users submit the original power of attorney, original lawsuit letter, and original principal approval letter to proceed electronically.

Selanjutnya kepada pihak Tergugat, hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik. Namun apabila Tergugat diwakili oleh advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan lagi. Jika pihak Tergugat tidak menyetujui untuk beracara secara elektronik maka persidangan dilaksanakan dengan prosedur beracara biasa.

Next to the Defendant, the judge offered to proceed electronically. However, if the Defendant is represented by an advocate, approval for electronic proceedings is no longer necessary. If the Defendant does not agree to proceed electronically, the trial will be conducted using the manual procedure

Langkah selanjutnya majelis hakim meneliti dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat, menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama dan memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

In the next step, the panel of judges examine the electronic documents submitted by the Plaintiff, set the schedule for the trial and the first session, and order the parties to mediate in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016.

Pada proses persidangan lanjutan, majelis hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik (court calendar) untuk penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan. Jadwal persidangan yang telah ditetapkan akan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

In the next proceeding of the trial, the panel of judges set an electronic trial schedule (court calendar) for the delivery of answers, second declaration from the plaintiff, final reply from the defendant, evidence, conclusions, until the reading of decisions. The trial schedule that has been set will be communicated to the parties through the Court Information System.

Selanjutnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditentukan. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya kecuali dengan alasan yang sah, maka persidangan akan ditunda 1(satu) kali.

Selanjutnya dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada hari sidang yang telah ditentukan. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat tidak mengirimkan replik/kesimpulan, Tergugat tidak mengirimkan jawaban/duplik/kesimpulan secara elektronik tanpa alasan yang sah, maka dianggap tidak menggunakan haknya kecuali dengan alasan yang sah, maka persidangan akan ditunda 1(satu) kali.

Furthermore, Supreme Court Regulation Number 1 Year 2019 states that the defendant submits an answer electronically on the specified trial day. If on the determined trial schedule, the Plaintiff does not send a second declaration/ conclusion, the Defendant does not send a final reply/conclusion electronically without a valid reason, then it is deemed that they don't use their rights except for a default reason, the trial will be postponed 1 (one) time.

Setelah majelis hakim memverifikasi jawaban/replik/duplik yang diajukan masing-masing oleh Pengugat dan Tergugat secara elektronik maka majelis hakim meneruskannya kepada Penggugat/Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

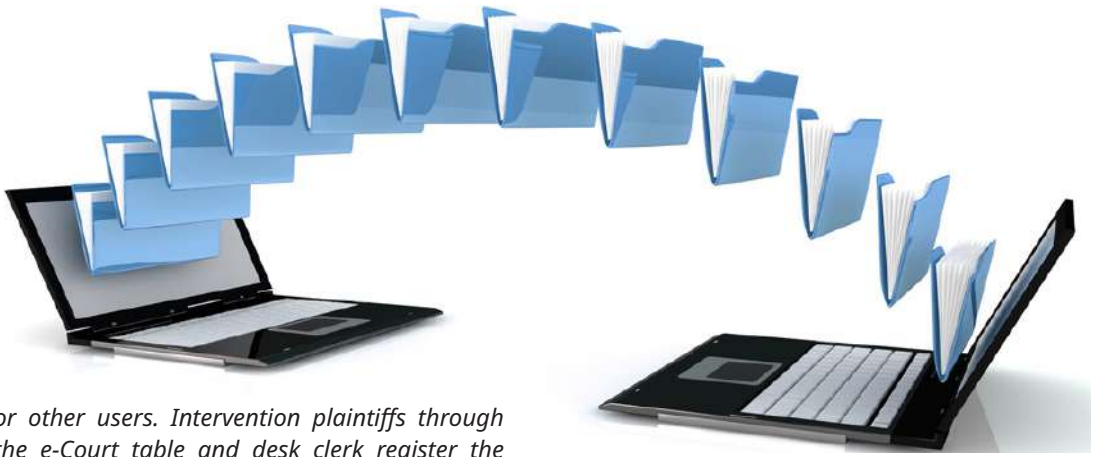
After the panel of judges verifies the answers / a second declaration/ final reply submitted individually by the Plaintiff and Defendant electronically, the panel of judges forward them to the Plaintiff / Defendant through the Court Information System.

b. Intervensi Pihak Ketiga/

Third-Party Intervention

Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain. Penggugat intervensi melalui meja e-Court dan petugas meja mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi kemudian petugas mengunggah gugatan intervensi dan surat kuasa ke dalam sistem informasi pengadilan.

Third parties who submit interventions must fulfill the requirements as registered users and/



or other users. Intervention plaintiffs through the e-Court table and desk clerk register the intervention case through an account that has been prepared by downloading an intervention suit and then the officer uploads the intervention suit and the power of attorney into the court information system.

Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Gugatan intervensi, tanggapan/jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan kepada para pihak secara elektronik. Selanjutnya majelis hakim mengeluarkan penetapan, penggugat intervensi diterima atau ditolak sebagai pihak dalam perkara tersebut.

The process of examining a lawsuit for intervention is carried out electronically in accordance with the valid procedural law. Intervention lawsuit, response/answer of parties to the intervention claim is submitted to the parties electronically. Subsequently, the panel of judges issues a stipulation, whether the intervention plaintiff is accepted or rejected as a party to the case.

9. Pembuktian Secara Elektronik/

Electronic Prove Trial

Dalam proses beracara secara elektronik, para pihak wajib menggunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Sedangkan asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.

In the electronic proceeding process, the parties must upload stamped documentary evidence into the Court Information System. While the original evidence is shown before the session that has been determined.

Totalitas dan tanggungjawab Mahkamah Agung terhadap perkembangan teknologi informasi terlihat dalam proses pembuktian secara elektronik ini. Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual atau disebut dengan telekonferensi, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

The totality and responsibility of the Supreme Court towards the development of information technology is seen in this electronic verification process. Proof trials by examining the witness and/or expert statements can be carried out remotely through audiovisual communication media or called teleconference so that all parties see and hear each other directly and participate in the trial.

Dalam pemeriksaan secara telekonferensi ini, saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama setempat. Biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada Tergugat yang menghendaki.

In this teleconference examination, witnesses and/or experts provide information under oath, in front of the judge and the substitute registrar appointed by the Chair of the local Religious Court. Costs arising from the implementation of the audiovisual communication process are borne by the Plaintiff and/or the Defendant who wants the audiovisual.

Pelaksanaan telekonferensi dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli tersebut akan memberikan keterangan. Pengadilan tersebut harus menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan telekonferensi.

The teleconference is carried out with infrastructure at the court where the witness and/or expert will provide information. The court must provide the facilities and infrastructure required during the teleconference process.

Pemeriksaan secara jauh terhadap saksi dan saksi ahli ini merupakan solusi bagi para pihak yang mengalami hambatan menghadirkan saksi atau ahli yang tidak bisa hadir di ruang sidang karena berbagai alasan seperti sakit atau berada jauh dari Pengadilan.

Remote examination of witnesses and expert witnesses is a solution for those who experience obstacles in bringing witnesses or experts who cannot attend the courtroom for various reasons such as being sick or being away from the court.

10. Pemeriksaan Setempat/

Local Inspection

Jika dalam pemeriksaan suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat maka dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku yakni dilakukan secara langsung dengan dihadiri para pihak dan pihak-pihak terkait. Setelah majelis hakim menjatuhkan putusan sela pemeriksaan setempat, kemudian ditentukan tanggal pelaksanaannya dalam court calendar. Setelah melaksanakan pemeriksaan setempat, Panitera Pengganti wajib mengunggah berita acara pemeriksaan setempat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

If the examination of a case requires a local inspection then it is carried out in accordance with the valid procedural law that is carried out directly in the presence of the parties and related parties. After the judicial panel decrees the interim verdict, then the date of its implementation is determined in the court

calendar. After carrying out a local examination, the Substitute Registrar shall upload the minutes of the local inspection into the Court Information System.

11. Pembacaan Putusan Secara

Elektronik/

Electronic Court Decision

Pronouncement

Pada tanggal yang telah ditetapkan majelis hakim ketua membacakan secara elektronik. Pengucapan putusan tersebut secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan elektronik dalam format pdf kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pembacaan putusan sebagaimana dimaksud secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

On the scheduled date, the chief panel of judges reads it electronically. The pronouncement of the verdict has been legally carried out by delivering the electronic decision in pdf format to the parties through the Court Information System. The reading of the decision by law is deemed to have been attended by the parties.



12. Upaya hukum secara elektronik/

Electronic Law Remedies

Permohonan upaya hukum secara elektronik dapat diajukan pihak yang sejak awal beracara secara elektronik dan telah menerima putusan elektronik dari aplikasi e-Court dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian membayar panjar biaya perkara melalui prosedur aplikasi e-Court.

Requests for electronic remedies can be filed by parties who have initiated electronic proceedings and have received electronic decisions from the e-Court application within the time period in accordance with valid regulations and then pay court fees via e-Court app.

Panitera pengadilan yang bersangkutan menerbitkan akta pernyataan upaya hukum secara elektronik. Pemberitahuan pernyataan banding/kasasi/peninjauan kembali, penyerahan memori banding/kasasi/peninjauan kembali, kontra memori banding/kasasi/peninjauan kembali maupun inzage dilakukan secara elektronik. Kemudian pengiriman bundel A dan B secara elektronik.

The court Registrar issue an electronic remedy statement. Notification of appeal/cassation/review, submission of appeal/cassation/ review memory, counter-memory of appeal/cassation/judicial review also inzage (case file inspection), is done electronically. Then send bundles A and B electronically.

Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung mengunduh dokumen elektronik dari pengadilan tingkat pertama sebagai backup data. Pemberitahuan putusan banding/kasasi/peninjauan kembali diberitahukan oleh pengadilan pengaju secara elektronik paling lambat 14 (empat belas hari) setelah pengucapan putusan secara elektronik.

The High Court or The Supreme Court downloads electronic documents from the claimant court as data backup. Notification of appeal/cassation/review decision is notified by the claimant court no later than 14 (fourteen days) after the pronouncement of the decision.

Catatan Akhir/ Endnote:

Venti Eka Satya, Strategi Indonesia Menghadapi Industri 4.0, Jurnal Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Jakarta, Vol. X, 09/I/Puslit/Mei/2018, hal. 19-21.
Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", UPT PMK Sosial Humaniora, FBMT, Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya, hal. 22.
10 Tantangan Pengadilan Secara Universal disampaikan oleh Yang Mulia Sunarto, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, pada Pembinaan Bagi Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara di Megamendung, 9 September 2019.
Tim Penyusun Ditjen Badilag MA RI, Mewujudkan Peradilan Agama yang Agung, Phoenix Publisher: Yogyakarta, 2019, hal. 132.
Mahkamah Agung, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010, hal. 14.
Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia (Menakar beracara di Pengadilan secara Elektronik), Kencana: Jakarta, hal. 86.
Dory Reiling, Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform, Leiden: Leiden University, hal. 17.
Amran Suadi, Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, hal. 120.



Ensiklopedi Encyclopedia

Pengadilan Elektronik

Electronic Court (E-Court)

E-Court adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung bagi pemenuhan administrasi dan perbaikan layanan para Pengguna (Pencari Keadilan) yang Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online. E-court adalah aplikasi yang menyediakan berbagai fitur pengadministrasian perkara yang sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik. Pada aplikasi e-court ini para pencari keadilan juga dapat mengetahui Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online tanpa perlu datang bahkan mengantri di Pengadilan yang dituju, pembayaran secara online (virtual) yang terafiliasi kepada beberapa bank di Indonesia. Advokat dan masyarakat luas yang telah menjadi Pengguna terdaftar dapat secara penuh menggunakan aplikasi ini untuk mendaftarkan perkaranya secara daring. Penerapan e-court didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

E-Court is an app developed by the Supreme Court for the fulfillment of administration and service improvement for Online Case Registration. E-court provides features that allows cases adminirated electronically. In this application, justice seekers can also figure out estimated cost of court fees without directly coming to PTSP and online payment (virtual) which is affiliated to several banks in Indonesia. Both attorney and non-attorney who has fully registered in its database can use this application for filing lawsuit virtually. Implementation of e-court regulated in Supreme Court Rules Number 1 Of 2019 on Electronic Court Administration.

Persidangan secara Elektronik

Electronic litigation (E-Litigation)

E-litigasi merupakan suatu aplikasi yang mendukung dalam hal proses persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik melalui email. Persidangan dengan e-litigasi ini sangat hemat biaya, waktu dan energi. E-Litigasi secara umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu menyederhanakan mekanisme yang sebelumnya terlihat rumit, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat parsial dalam proses persidangan yang berjalan, dan administrasi yang dahulu bersifat manual dilaksanakan secara virtual dalam kondisi tertentu. E-litigasi memungkinkan terjadinya persidangan secara daring, baik pengiriman dokumen secara elektronik dalam proses jawab-menjawab maupun pemeriksaan saksi secara teleconference.

E-Litigation is an app that supports the trial process electronically (online) by which trial documents such as respond, re-respond, and conclusions sent electronically. E-litigation effectively cut off time and cost. E-Litigation is generally carried out with the following principles: simplifying procedures that seem complicated, integrating partial procedural law in the ongoing trial process, and administration that was previously manual is implemented virtually under certain conditions. E-litigation allows trial conducted virtually, including electronically deliver document and witness trial by teleconference.

Pemanggilan Pihak secara online

Electronic summons (E-Summons)

E-Summons adalah pemanggilan para pihak berperkara secara elektronik. Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court. Dengan fitur ini, seorang jurusita atau jurusita pengganti untuk menyampaikan surat panggilan sidang secara tatap muka ataupun titip melalui desa/kelurahan. Dengan E-summons, pemanggilan lebih sederhana dan menghemat biaya panggilan, bahkan 0 rupiah. Artinya pula bahwa fitur e-summons menjadikan biaya berperkara lebih terjangkau.

E-Summons is an electronic summons of parties. Summons and Notification of Decisions are delivered to parties via electronic channels (parties' email addresses). This feature allows bailiff or substitute bailiff to deliver a summons without coming directly to parties' place. E-summons simplify summons procedure and cut off cut off costs, even at 0 rupiahs. It also shows that e-summons generally makes court fees far more affordable.

Tanda tangan elektronik / Digital Signature

Electronic signature (E-Signature)



E-Signature adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik terdiri atas empat elemen dasar, yaitu data message, signatory, certificate, dan certification service provider. Saat ini, tanda tangan elektronik diterapkan dalam penyampaian salinan putusan resmi kepada para pihak berperkara. Dengan adanya tanda tangan elektronik di dalam Salinan putusan tersebut, maka keabsahannya terjamin.

E-Signature is a signature consisting of electronic information that is attached, associated with other electronic information that is used as a verification and authentication tool. Electronic signatures consist of four basic elements: data messages, signatory, certificates, and certification service providers. At present, electronic signatures are applied in the delivery of copies of official decisions to litigants. With the electronic signature in the copy of the court decision, its validity is guaranteed.

Inspirasi inspiration



Mengapa Majalah Tribunal? *Why Tribunal Magz?*

Berawal dari obrolan santai di sebuah kedai kopi, perbincangan yang semula santai teralih ke pembicaraan serius. Sekelebat muncul keinginan bersama untuk melahirkan satu publikasi yang menjadi wajah depan PTA Bandar Lampung. Pencarian ke berbagai sumber kemudian memunculkan ide menerbitkan majalah yang disajikan dalam dua Bahasa. Bagaimana platformnya?

A casual chat in a coffee shop was the starting point, it was initially relaxed then diverted to a serious conversation. All of a sudden, a common desire emerged to initiate a publication that became the main display of Bandar Lampung Religious High Court. Searching for various sources then gave rise the idea of publishing a magazine presented in two languages. But, how is the platform?

Tim kecil melanjutkan penelusuran sejumlah publikasi dan menemukan "Majalah Peradilan Agama" yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Tabloid "Judiciary Times" yang diterbitkan Mahkamah Agung Singapura. Keduanya adalah publikasi Lembaga yang disajikan dalam platform berbeda. Yang pertama disajikan dalam Bahasa Indonesia dan memaparkan berbagai hal tentang administrasi peradilan, penemuan hukum, kebijakan-kebijakan strategis Lembaga, serta perkembangan terbaru dalam sistem hukum di negara lain. Sementara itu, tabloid Judiciary Times disajikan dalam Bahasa Inggris dan mengetengahkan kebijakan-kebijakan terbaru serta perkembangan hukum di Singapura.

A small team continued to search several publications and found the "Religious Court Magazine" which was published periodically by the Directorate General of the Religious Courts of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the "Judiciary Times" which was published by Supreme Court of Singapore. Both are official publications that are presented on different platforms. The first is presented in Indonesian and describes various matters regarding the administration of justice, legal findings, strategic policies of the institute, as well as the latest developments in the legal system in other countries. Meanwhile, the Judiciary Times newsletter is presented in English and presents the latest policies and legal developments in Singapore.



Ide awal tadi kemudian menguat dengan melihat kedua publikasi tersebut. Sajian dari kedua publikasi itu memaparkan banyak aspek tentang dunia peradilan. Paparannya memberi inspirasi bagi upaya-upaya bersama mewujudkan Lembaga peradilan yang kredibel dan menjadi harapan masyarakat bagi tegaknya keadilan. Maka, disepakatilah untuk menerbitkan majalah yang menggabungkan dua platform tadi ke dalam satu majalah yang menyintesis kelebihan dari masing-masing publikasi tersebut

The initial idea was later bolded by looking at these two. The presentations of both publications describe many aspects of the world of judiciary. Their presentation inspired the joint efforts to create a credible judicial institution and become the hope of the community for upholding justice. By the end, team agreed to publish a magazine that combines the two platforms into one magazine that synthesizes the strengths of each of these publications.

Pemilihan kata "Tribunal" sebagai nama majalah ini muncul karena orientasi dan pembahasannya seputar dunia peradilan. Kata "Tribunal" yang bermakna pengadilan atau peradilan dipandang mewakili kehendak awal penerbitan majalah ini.

"Tribunal" was picked up as the name of this magazine because its orientation and discussion distinctly embrace the world of judiciary. The word of "Tribunal" means "court" or "judiciary" represents the original intent of this magazine.

Mengapa dua Bahasa? Majalah ini dimaksudkan untuk tidak hanya menjadi bacaan seluruh warga Peradilan di Indonesia, namun juga dapat menjadi bacaan bagi dunia internasional. Ada keinginan agar hadirnya majalah ini dapat menjadi wadah diseminasi informasi yang mewakili kehendak bersama dalam mengangkat citra lembaga peradilan. Hadirnya majalah juga diharapkan semakin meningkatkan pemahaman public terhadap Lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama.

Question raised, why two languages? This magazine is intended to not only be read by all stakeholders of the Judiciary in Indonesia, but also can be read for the international world. There is a desire that the presence of this magazine can be primary vessel for disseminating information that represents the common will in uplifting

image of the judiciary. The presence of the magazine is also expected to further increase public understanding of the judiciary, especially the Religious Courts.

Di luar itu semua, majalah ini membawa misi mendorong publikasi di lembaga peradilan secara signifikan. Kehadiran majalah ini diharapkan menggairahkan lagi publikasi-publikasi lembaga peradilan yang berkualitas serta mendorong kreativitas dalam manajemen lembaga peradilan.

Beyond these all, it carries common mission of significantly encouraging publication in the judiciary institutions. The presence of this magazine is expected to stimulate more quality judicial publications and encourage creativity in the management of justice institutions.



Apa Kata Mereka...???

What people say?



Huge appreciation for the second issuance of Tribunal bilingual magazine. The issuance was aimed to elevate the quality and number of Religious court publications. Bandar Lampung Religious High Court definitely capable to issue bilingual magazine which meets qualification both national and international standard. I expect this issuance encourage other courts to more understand judicial system in Indonesia.

Dr. Abdullah, S.H., M.S.
**Chief of Legal and Public Relation
Bureau of the Supreme court**

Remarkable achievement for Bandarlampung Religious High Court. This magazine confirms it's commitment to disseminate useful information as well as insight the law and justice. The bilingual presentation platform is on step ahead that I have never even found in other judiciary publications. Congratulations, hopefully keep its continuance and inspire us all.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.,
**Associate Judge of Bandarlampung
Religious High Court**



Congrat...
I, personally, Congratulate and highly appreciate to Bandar Lampung Religious High Court, founder of Tribunal bilingual magazine. This magazine is effectively communicate and educate all of stakeholders. For us, as a new Judge, it massively motivates us to effort more achievement and deeply learn much more about legal studies.

Salutt...!!!!

Laili Herawati, S.Sy.
**(Judge of 8th batch) Judge of Religiouis Court
of Tulang Bawang Tengah**



Dynamics of the state system as the following of reformation era, advances in information technology, and the influx of globalization have produced new challenges for the judiciary in upholding law and justice. And, thank God, the bilingual format of Tribunal Magazine addressed one of the readiness of judicial institutions (particularly Bandarlampung Religious High Court) in responding to these challenges.

Sudarsono, S.H., M.H.

Justicial Judge of The Directorate General of Military and Administrative Court



A major breakthrough by the Religious High Court of Bandarlampung in publishing bilingual magazine "Tribunal". This achievement is most appreciated based on the fact that there is no other official bilingual publications by other courts in Indonesia. The magazine will be an essential reading, not only for officials of religious courts, but also other realm of judiciaries. The magazine expected to inspire all courts in Indonesia to strive for similar breakthrough so that become a platform for the court in disseminating ideas to the people in Indonesia. The bilingual nature of the magazine can also promote Indonesian courts on international level. Yet again, congratulations for the publishing of the No. 2 of the 1st Volume of Tribunal magazine. Best of luck.

Dr. Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum.

Chief Judge of The Bengkulu High Court

Simply interesting

Tribunal magazine is providing significant information yet delivering it casually, charmed, and easy to read. Cheer up and have a better luck for next issuance.

D.Y. Witanto

Justicial Judge for Legal and Public Relation Bureau of the Supreme Court



"Tribunal should be a primary literacy for all of law enforcement agencies in Lampung"

Baehaki :

Senior Photo Contributor for Kontan Magz

BEHIND THE SCENE



Dapur REDAKSI





COMING SOON

Judiciary Mobile Podcast:
Episode Program Peradilan PTA Bandar Lampung



#judiciarymobilepodcast #religiouscourt #bandarlampung #tribunal

Vice Chief Judge of Bandar Lampung Religious Court: TRIBUNAL GOES WORLDWIDE!!!

2,362,020 view

40K

0

SHARE

SAVE

...



Judiciary Mobile Podcast
Supported by Bandar Lampung Religious High Court
1.65 M subscribers

SUBSCRIBE



SHOW MORE



Alamat Redaksi / Address:

Jl. Basuki Rahmat Nomor 24 Kelurahan Sumur Putri,
Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung 352211
e-mail: redaksi.tribunal@gmail.com

